

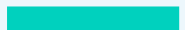


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

Kementerian Sekretariat Negara

2025



Kementerian Sekretariat Negara
Jl. Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat 10110
www.setneg.go.id



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara selama periode tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan realisasi dan capaian target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.

Jakarta, 27 Februari 2026

Menteri Sekretaris Negara,

Prasetyo Hadi



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara	8
1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara	9
2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara.....	9
C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara.....	10
D. Sumber Daya Manusia Aparatur	12
E. Aspek Strategis	13
F. Permasalahan Utama	14
G. Sistematika Penyajian Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
1. Visi Kementerian Sekretariat Negara.....	16
2. Misi Kementerian Sekretariat Negara	16
3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara	17
4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara.....	17
5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara	20
6. Program Kementerian Sekretariat Negara	21
B. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Tujuan.....	25
1. Formulasi Pengukuran Tujuan.....	25
2. Capaian Kinerja Tujuan	28



B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	28
1. Formulasi Pengukuran Sasaran Strategis	28
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	29
C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	32
1. Sasaran Strategis “Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas”	32
2. Sasaran Strategis “Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas”	37
3. Sasaran Strategis “Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif”	44
4. Sasaran Strategis “Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas”	54
5. Sasaran Strategis “Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan”	60
6. Sasaran Strategis “Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi”	71
7. Sasaran Strategis “Pengendalian internal yang efektif”	82
8. Sasaran Strategis “Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel”	85
9. Sasaran Strategis “Pelaksanaan tugas khusus yang optimal”	89
10. Sasaran Strategis “Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas”	90
11. Sasaran Strategis “Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas”	97
12. Sasaran Strategis “Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas”	101
D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja	103
1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023-2025	103
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025	105
E. Akuntabilitas Keuangan	109
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Program	109
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis	109



F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	111
1. Keuangan.....	111
2. Sarana dan Prasarana.....	111
3. Sumber Daya Manusia	112
G. Pemanfaatan Informasi Kinerja	112
1. Perencanaan Kinerja.....	112
2. Peningkatan Kinerja	112
H. Kinerja Lainnya	113
I. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024	115
BAB IV PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Upaya ke Depan	117

**LAMPIRAN A PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2024**

**LAMPIRAN B MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR
KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**



Daftar Tabel

TABEL 1	KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENIS JABATAN	13
TABEL 2	TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024.....	18
TABEL 3	PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2025	21
TABEL 4	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN.....	25
TABEL 5	CAPAIAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2025	28
TABEL 6	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025	29
TABEL 7	KELUARAN HASIL ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33
TABEL 8	KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM	35
TABEL 9	KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN	37
TABEL 10	KELUARAN ANALISIS KEBIJAKAN KEPADA WAKIL PRESIDEN	39
TABEL 11	KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN MENURUT JENIS PERMASALAHAN	42
TABEL 12	KEGIATAN PELATIHAN PROGRAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR	45
TABEL 13	KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI.....	49
TABEL 14	JENIS KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TAHUN 2025	51
TABEL 15	RINCIAN HASIL PENILAIAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	52
TABEL 16	KELUARAN DOKUMEN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI	54
TABEL 17	KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN	58
TABEL 18	KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	61
TABEL 19	KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN.....	63
TABEL 20	KELUARAN LAYANAN PERS DAN MEDIA KEPADA PRESIDEN.....	64
TABEL 21	KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA WAKIL PRESIDEN	64
TABEL 22	KELUARAN NOTULA KEGIATAN WAKIL PRESIDEN	65



TABEL 23 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PRESIDEN	66
TABEL 24 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN WAKIL PRESIDEN	67
TABEL 25 KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP	70
TABEL 26 HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ..	72
TABEL 27 HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	75
TABEL 28 HASIL PENILAIAN EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	78
TABEL 29 RINCIAN HASIL PENILAIAN INDEKS MATURITAS SPBE	81
TABEL 30 HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	83
TABEL 31 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	86
TABEL 32 KELUARAN REKOMENDASI ATAS RENCANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH YANG TELAH DIMANFAATKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	91
TABEL 33 KELUARAN REKOMENDASI ATAS ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH YANG MENGALAMI HAMBATAN YANG DITINDAKLANJUTI	93
TABEL 34 KELUARAN REKOMENDASI ATAS HASIL PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH YANG DITINDAKLANJUTI OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	96
TABEL 35 KELUARAN NASKAH KEPRESIDENAN YANG DIMANFAATKAN.....	100
TABEL 36 KELUARAN DOKUMEN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA, JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, DAN JABATAN LAINNYA YANG DIMANFAATKAN.....	102
TABEL 37 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN.....	104
TABEL 38 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023-2025	105
TABEL 39 RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM TAHUN 2023-2025.....	109
TABEL 40 PERBANDINGAN RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025.....	109



Daftar Gambar

GAMBAR 1	BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	11
GAMBAR 2	KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN	12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Kementerian Sekretariat Negara merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara selama tahun 2025. Laporan ini dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara berkesinambungan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

LKj memuat laporan atas capaian kinerja yang merupakan perbandingan antara rencana/target kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025 dengan realisasi kinerja. PK disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, yang di dalamnya memuat Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun pelaporan realisasi kinerja selama kurun waktu tahun 2025 telah dilakukan secara berkala melalui aplikasi berbasis *web* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (<https://e-monev.bappenas.go.id/>) dan Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id/>).

Dalam LKj ini, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dijabarkan secara komprehensif, meliputi:

1. capaian kinerja *output*;
2. capaian kinerja *outcome*;
3. faktor pendukung keberhasilan; dan
4. permasalahan/kendala dan solusi.

Pada bagian akhir LKj, juga disajikan kesimpulan dan upaya ke depan yang akan ditempuh Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara diatur pada Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Mengingat LKj Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025 memuat laporan atas capaian kinerja sepanjang periode tahun 2025, maka tugas dan fungsi yang diuraikan pada LKj ini adalah terbatas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024.



1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. Kementerian Sekretariat Negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
- b. pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
- d. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, dan pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, serta penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, penyelesaian permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, perubahan pidana mati atau perubahan pidana penjara seumur hidup, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- e. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, serta penyelenggaraan kemitraan;
- f. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;



- g. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah;
- h. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- i. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analisis kerja sama;
- j. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian;
- k. pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
- l. koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian;
- m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
- n. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- o. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- p. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

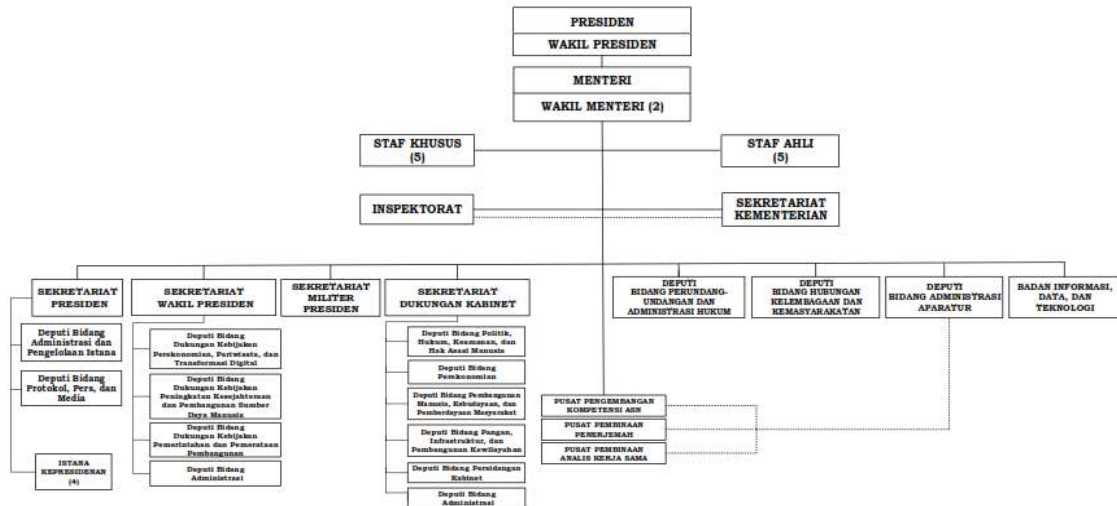
C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara

Susunan organisasi Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Sekretariat Presiden;
- c. Sekretariat Wakil Presiden;
- d. Sekretariat Militer Presiden;
- e. Sekretariat Dukungan Kabinet;
- f. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
- g. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- h. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
- i. Badan Teknologi, Data, dan Informasi;
- j. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
- m. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- n. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
- o. Inspektorat;



- p. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- q. Pusat Pembinaan Penerjemah; dan
- r. Pusat Pembinaan Analisis Kerja Sama.



GAMBAR 1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Selain susunan organisasi di atas, Kementerian Sekretariat Negara juga mengoordinasikan dan mengelola lembaga lain, antara lain:

1. Sekretariat lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara, yaitu:
 - a. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
 - b. Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden;
 - c. Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan yang selanjutnya bertransformasi menjadi Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah;
 - d. Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional; dan
 - e. Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

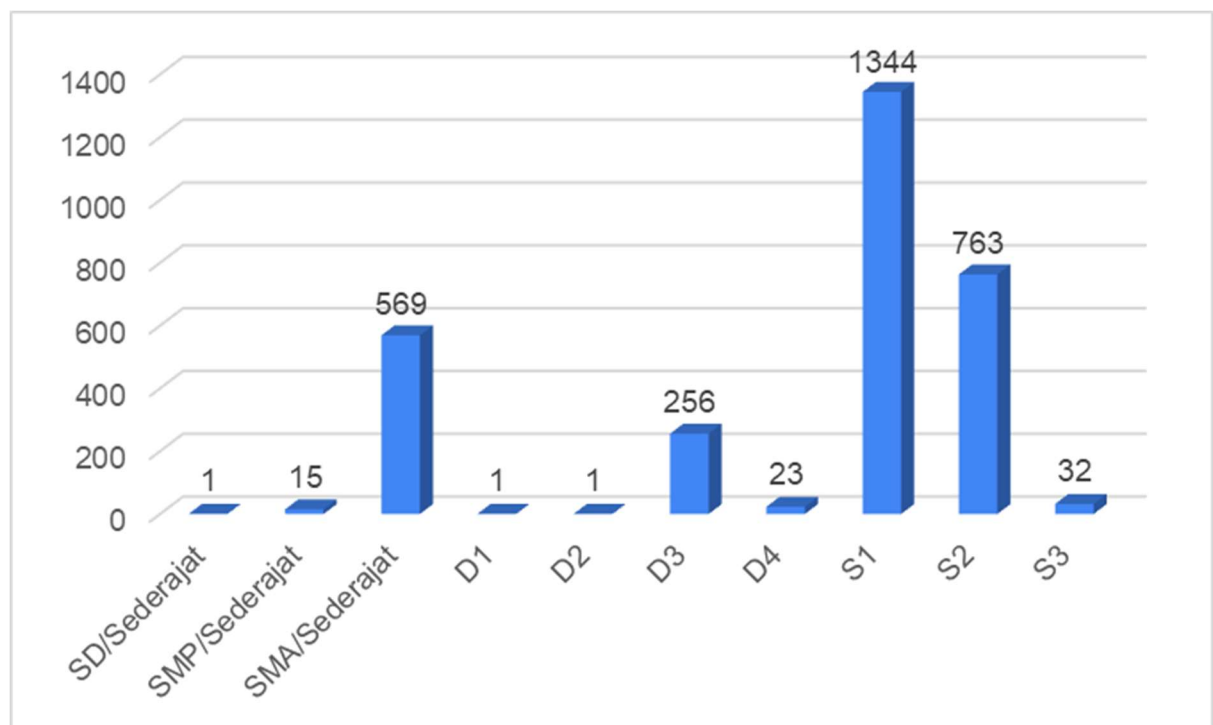


2. Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian, yaitu:
 - a. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
 - b. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

D. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 3.005 orang per 31 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, aparatur berjenis kelamin pria sebanyak 1.724 orang atau 57,37% dan aparatur berjenis kelamin wanita sebanyak 1.281 orang atau 42,63%.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebanyak 32 orang berpendidikan S3, 763 orang berpendidikan S2, 1.367 orang berpendidikan S1/D4, 258 orang berpendidikan Diploma (D1-D3), dan 585 orang berpendidikan SMA ke bawah.



GAMBAR 2
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN



Selanjutnya, ditinjau dari jenis jabatan, aparatur Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2025 menduduki 382 jabatan struktural, 1.336 jabatan fungsional, dan 1.287 jabatan fungsional umum (pelaksana).

TABEL 1
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
MENURUT JENIS JABATAN

JABATAN		JUMLAH	PERSENTASE
Struktural		382	12,71%
1.	Eselon I	27	
2.	Eselon II	84	
3.	Eselon III	79	
4.	Eselon IV	180	
Fungsional Keahlian		1.336	44,46%
1.	Ahli Utama	9	
2.	Ahli Madya	272	
3.	Ahli Muda	463	
4.	Ahli Pertama	431	
5.	Penyelia	36	
6.	Mahir	27	
7.	Terampil	98	
Pelaksana		1.287	42,83%
JUMLAH		3.005	100%

E. Aspek Strategis

Aspek strategis dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025, diantaranya:

1. Pelaksanaan agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yaitu terkait dengan Program Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, khususnya pada Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional.
Kementerian Sekretariat Negara mendukung Proyek Prioritas Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang secara konkrit dilaksanakan melalui kegiatan strategis Layanan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Dokumen Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).
2. Kementerian Sekretariat Negara berperan dalam posisi sentral yang mensupervisi seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan serta memastikan tahapan pencapaiannya oleh segenap Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pelaksanaan dukungan program percepatan pencegahan anak kerdil (*stunting*).



4. Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Kabinet Merah Putih Tahun 2025 - 2029.

F. Permasalahan Utama

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama tahun 2025, antara lain:

1. Kedaulatan teknologi dan transformasi digital
Kemajuan teknologi yang didominasi oleh disrupsi kecerdasan artifisial/*artificial intelligence* (AI) selain berpotensi pada meningkatnya modernisasi birokrasi dan produktivitas layanan publik juga berpotensi pada meningkatnya risiko keamanan siber seperti *malware* berbasis AI dan *deepfakes*. Oleh sebab itu, perlu diimbangi dengan kesiapan tata kelola, regulasi, dan kapasitas aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
2. Belum meratanya kompetensi aparatur
Kompetensi aparatur yang belum merata berpotensi untuk menghambat terwujudnya pelaksanaan kerja sama lintas unit kerja internal dan eksternal yang sinergis. Keterlambatan penyelesaian tugas pada unit kerja eksternal/internal dapat mengganggu kinerja di unit lain.
3. Penyesuaian organisasi berkenaan dengan pergantian kepemimpinan nasional
Penataan organisasi Kementerian/Lembaga ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
4. Masih terdapat interdependensi penyelenggaraan layanan dengan pihak eksternal Kementerian/Lembaga lain.
Peran Presiden dan Wakil Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi, menumbuhkan harapan besar bagi rakyat untuk dapat menyampaikan keluhan, aduan, dan kebutuhan secara langsung agar mendapatkan penyelesaian dengan segera.
Pengoordinasian penyelesaian permasalahan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden tersebut menjadi tugas dan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Beragamnya permasalahan yang masuk serta kompleksitas para pihak yang terlibat menciptakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian permasalahan. Selain itu, berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat terlepas dari peran serta instansi lainnya, antara lain proses harmonisasi dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang sangat tergantung pada inisiatif dari instansi pemrakarsa serta regulator.

G. Sistematika Penyajian Laporan

Penjelasan umum atas capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan upaya perbaikan kinerja di masa datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025 adalah sebagaimana berikut.



Bab I Pendahuluan, memuat penjelasan umum tentang latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat pengukuran capaian kinerja tujuan, capaian kinerja sasaran strategis, analisis capaian indikator kinerja utama, perbandingan capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan informasi kinerja, kinerja lainnya, dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan upaya kedepan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pemerintahan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (periode tahun 2020-2024) ke Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (periode tahun 2025-2029), sehingga Perjanjian Kinerja/Perencanaan Kinerja Tahun 2025 masih disusun dengan berpedoman pada capaian kinerja pada tahun sebelumnya, dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025, dan tahap akhir dari target pembangunan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 serta perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024. Adapun dokumen Renstra dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama, Program, dan Target Tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

"Kementerian Sekretariat Negara yang berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dengan visi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara secara strategis akan melakukan berbagai upaya perubahan berkelanjutan guna menciptakan organisasi yang menjadi teladan atau dapat ditiru oleh organisasi lain, berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam mendukung terwujudnya visi Presiden untuk menciptakan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasis pemanfaatan SDM unggul.

2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, responsif, dan inovatif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;



2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media serta koordinasi pengamanan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Hasil Analisis yang Berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”**
 - a. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
 - b. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas.
 - c. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif.
 - d. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas.
 - e. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas.
 - f. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas.



- g. Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terselenggaranya Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang Berkualitas, Lancar, dan Aman”

Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara”

- Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi.
- Pengendalian internal yang efektif.
- Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
- Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran-sasaran strategis di atas, disusun Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara berikut dengan target jangka menengahnya. Penjabaran keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan IKU dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

TABEL 2
TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
			2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
		2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
			4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
			5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
		3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular
			7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri
			8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri
		4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri
			10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
		5. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas.	11. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan
			12. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti
			13. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti
		6. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	14. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
			15. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan
		7. Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas	16. Persentase tingkat kepuasan dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	8. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	17. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
			18. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden
			19. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden
			20. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	9. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	21. Indeks Reformasi Birokrasi
			22. Indeks Sistem Merit
			23. Indeks Profesionalitas ASN
			24. Hasil Evaluasi Kelembagaan
			25. Indeks Maturitas SPBE
		10. Pengendalian internal yang efektif	26. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		11. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	27. Nilai Akuntabilitas Kinerja
		12. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	28. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara
			29. Persentase capaian kinerja tugas khusus

5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Sebagai langkah awal dalam penyusunan program, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Pengembangan cara berpikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal organisasi, melalui tata kelola berbasis manajemen risiko yang didukung teknologi mutakhir.

Langkah konkret strategi ditekankan pada transformasi digital, meliputi perubahan pola pikir dan cara kerja analog menjadi digital termasuk pengembangan talenta agar memiliki karakter pembelajar yang kuat, pembangunan Kantor Kementerian Sekretariat Negara berbasis teknologi terkini, dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data (*data driven policy making*).

2. Penguatan kelembagaan dan penyempurnaan bisnis proses dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Langkah konkret strategi ditekankan pada deregulasi dan debirokratisasi, serta pengembangan ekosistem inovasi.

3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara, melalui:
 - a. pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berkesinambungan;
 - b. penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen SDM secara terpadu;
 - c. penataan kelembagaan yang dilakukan melalui: pemetaan kembali tugas fungsi sesuai mandat perundang-undangan dan sinkronisasi tugas, fungsi, dan pemisahan kewenangan yang makin jelas antara unit-unit organisasi di lingkungan Kantor Kepresidenan; dan
 - d. perluasan penerapan *e-government* dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan, komunikasi, dan berbagi.



6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Setelah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan dan strategi, maka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan uraian Rencana Strategis di atas, Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut.

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional	100%
2.	Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden, dan/atau Wakil Presiden	3,11 Skala 4
		4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,60 Skala 4
		5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	36%
3.	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Tingkat kepuasan peserta program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular	4 Skala 5
		7. Indeks efektivitas kerja sama teknik luar negeri	4 Skala 5
		8. Indeks pelayanan publik layanan administrasi perizinan perjalanan dinas	4 Skala 5
4.	Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	3,11 Skala 4



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	3,04 Skala 4
5.	Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,9 Skala 6
		12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,8 Skala 6
		13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,7 Skala 6
		14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,32 Skala 6
6.	Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara	81,10
		16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik
		17. Indeks Profesionalitas ASN	76
		18. Hasil Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	P3 dari P5 (50)
		19. Indeks Maturitas SPBE	3,5 Skala 5
7.	Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	3,32 (Level 3)
8.	Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,16 (BB)
		22. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP
9.	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%
10.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	24. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	90%
		25. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	90%
		26. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	90%



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11.	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	27. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	87,6%
		28. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%
12.	Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas	29. Persentase tingkat kepuasan dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir	90%

Untuk melaksanakan kinerja di atas, sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-867/MK.02/2024, tanggal 23 September 2024, pagu alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar **Rp2.901.862.847.000,00**, dengan rincian sebagai berikut.

1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar **Rp842.075.695.000,00**.
2. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp2.059.787.152.000,00**.

Selanjutnya, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, tanggal 24 Januari 2025, tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta hasil rekonstruksi efisiensi anggaran, Kementerian Sekretariat Negara diminta untuk melakukan efisiensi anggaran berupa pemblokiran anggaran pada pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar **Rp517.583.722.000,00**.

Dalam pelaksanaannya, anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 mengalami beberapa penyesuaian sebagai berikut.

1. Pembukaan blokir efisiensi anggaran sebesar **Rp395.195.078.000,00**, sehingga besaran blokir efisiensi anggaran berubah dari semula sebesar **Rp517.583.722.000,00 menjadi** sebesar **Rp122.388.644.000,00**. Pembukaan blokir efisiensi tidak menambah alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara.
2. Penambahan alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp3.774.288.940.000,00** yang terdiri dari:
 - a. Penggunaan saldo kas BLU sebesar **Rp255.166.966.000,00** yang terdiri dari BLU PPK Gelora Bung Karno sebesar **Rp181.249.522.000,00** dan PPK Kemayoran sebesar **Rp73.917.444.000,00**.



- b. Pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke BA 007 (Kementerian Sekretariat Negara) untuk mendukung kegiatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara TA 2025 sebesar **Rp3.519.061.160.000,00**.
- c. Penambahan anggaran untuk pembayaran Asuransi Gedung di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp60.814.000,00** yang bersumber dari Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagaimana ditetapkan melalui Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan nomor S-161/KN/KN.2/2025, tanggal 27 Oktober 2025.

Berdasarkan penyesuaian anggaran yang bersifat menambah alokasi, maka total alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara TA 2025 berubah menjadi sebesar **Rp6.676.151.787.000,00** atau **naik** sebesar **130,06%**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan

1. Formulasi Pengukuran Tujuan

Kinerja tujuan diukur berdasarkan hasil capaian indikator kinerja tujuan yang ditentukan dari nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis pada masing-masing indikator kinerja tujuan. Penjabaran formulasi pengukuran kinerja tujuan adalah sebagai berikut.

TABEL 4
FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	$\left[\sum_{i=1}^{16} \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{16}$ - Capaian IKU.1 “Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden” - Capaian IKU.2 “Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional” - Capaian IKU.3 “Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden” - Capaian IKU.4 “Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden” - Capaian IKU.5 “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti”



TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
		6. Capaian IKU.6 “Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular” 7. Capaian IKU.7 “Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri” 8. Capaian IKU.8 “Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri” 9. Capaian IKU.9 “Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri” 10. Capaian IKU.10 “Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan” 11. Capaian IKU.11 “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan” 12. Capaian IKU.12 “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” 13. Capaian IKU.13 “Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan, dan program pemerintah yang ditindaklanjuti” 14. Capaian IKU.14 “Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden” 15. Capaian IKU.15 “Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan” 16. Capaian IKU.29 “Persentase tingkat kepuasan dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir”



TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	$\left[\sum_{i=1}^4 \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{4}$ 1. Capaian IKU.16 “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden” 2. Capaian IKU.17 “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden” 3. Capaian IKU.18 “Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden” 4. Capaian IKU.19 “Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden”
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	$\left[\sum_{i=9}^9 \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{9}$ 1. Capaian IKU.20 “Indeks Reformasi Birokrasi” 2. Capaian IKU.21 “Indeks Sistem Merit” 3. Capaian IKU.22 “Indeks Profesionalitas ASN” 4. Capaian IKU.23 “Hasil Evaluasi Kelembagaan” 5. Capaian IKU.24 “Indeks Maturitas SPBE” 6. Capaian IKU.25 “Tingkat Maturitas SPIP” 7. Capaian IKU.26 “Nilai Akuntabilitas Kinerja” 8. Capaian IKU.27 “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara” 9. Capaian IKU.28 “Persentase capaian kinerja tugas khusus”



2. Capaian Kinerja Tujuan

Uraian capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

TABEL 5
CAPAIAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2025

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2025	
		Target	Capaian
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	100%	100%
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	100%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	100%	100%

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Formulasi Pengukuran Sasaran Strategis

Kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU). Formulasi pengukuran IKU pada masing-masing Sasaran Strategis dimuat dalam Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana terlampir.



2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Uraian capaian Sasaran Strategis dan IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

TABEL 6
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional	100%	100%	100%
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	3,11 Skala 4	3,13 Skala 4	100,64%
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,60 Skala 4	3,83 Skala 4	106,39%
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	36%	48,99%	136,08%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Tingkat kepuasan peserta program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular	4 Skala 5	4,54 Skala 5	113,50%
	7. Indeks efektivitas kerja sama teknik luar negeri	4 Skala 5	4,15 Skala 5	103,75%
	8. Indeks pelayanan publik layanan administrasi perizinan perjalanan dinas	4 Skala 5	4,40 Skala 5	110%
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	3,11 Skala 4	3,60 Skala 4	115,76%
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	3,04 Skala 4	3,74 Skala 4	123,03%
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,9 Skala 6	5,44 Skala 6	111,02%
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,8 Skala 6	5,21 Skala 6	108,54%
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,7 Skala 6	5,24 Skala 6	111,49%
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,32 Skala 6	5,38 Skala 6	124,54%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara	81,10	83,36	102,79%
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	17. Indeks Profesionalitas ASN	76	88,8	116,84%
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	P3 dari P5 (50)	P4 dari P5 (85,32)	170,64%
	19. Indeks Maturitas SPBE	3,50 Skala 5 (Sangat Baik)	3,95 Skala 5 (Sangat Baik)	112,86%
7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	3,32 (Level 3)	3,78 (Level 3)	113,86%
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,16 (BB)	82,02 (A)	107,69%
	22. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100%
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%
10. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	24. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	90%	99%	110%
	25. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	90%	97,68%	108,53%
	26. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
11. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	27. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	87,6%	95,05%	108,50%
	28. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
12. Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas	29. Persentase tingkat kepuasan dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir	90%	100%	111,11%

C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Sasaran Strategis “Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

- IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden; dan
- IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.



IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	100%	100%	100%
Tahun 2024	100%	100%	100%
Tahun 2025	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) IKU ini berupa 139 hasil analisis penyelesaian RPUU yang disampaikan kepada Presiden selama tahun 2025. Rincian hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 7
KELUARAN HASIL ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	HASIL ANALISIS RPUU	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Rancangan Undang-Undang	22	151	20
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	-	-	-
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah	67	54	35
4.	Rancangan Peraturan Presiden	82	206	59
5.	Rancangan Keputusan Presiden	30	33	11
6.	Rancangan Instruksi Presiden	4	2	14
Total		205	446	139

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keluaran kinerja berupa 139 hasil analisis penyelesaian RPUU yang disampaikan kepada Presiden seluruhnya digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dokumen RPUU yang telah disahkan/ditetapkan oleh Presiden menjadi peraturan perundang-undangan dimuat dalam situs web jdih.setneg.go.id. Dengan demikian, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait.
- 3) Koordinasi yang baik dengan Kementerian dan/atau Lembaga dan/atau *stakeholders* lainnya.
- 4) Tersedianya dukungan teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain: *Big Data Analytics* Perundang-undangan, JDIH Kementerian Sekretariat Negara, dan *cloud services*.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Keterbatasan sumber daya

Untuk mengatasinya organisasi berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- mengoptimalkan sumber daya yang tersedia;
- melakukan koordinasi untuk pengisian formasi sumber daya manusia;
- membuka penerimaan magang; dan
- melakukan koordinasi untuk penyediaan sarana dan prasarana.

- 2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan tergantung mitra kerja pemrakarsa dan/atau instansi lain.

Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dan instansi terkait.

IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	100%	100%	100%
Tahun 2024	100%	100%	100%
Tahun 2025	100%	100%	100%



a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) IKU ini berupa jumlah analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disampaikan kepada Presiden sebanyak 515 analisis. Rincian keluaran analisis selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

TABEL 8
KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

NO.	ANALISIS PERKARA/PERMOHONAN/ PERMASALAHAN/KAJIAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Litigasi:	209	205	325
	a. Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi	151	155	287
	b. Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung	13	13	14
	c. Gugatan Perdata	33	28	13
	d. Gugatan Tata Usaha Negara	12	9	11
2.	Permasalahan Hukum:	274	244	159
	a. Perlindungan Hukum	151	178	138
	b. Bantuan Hukum	17	-	-
	c. Permohonan terkait grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan	7	8	9
	d. Permasalahan terkait grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan	77	23	
	e. Pertimbangan kewarganegaraan	6	10	-
	f. Permasalahan kewarganegaraan	15	10	-
	g. Permohonan ekstradisi	1	-	-
	h. Kajian hukum	-	15	12
3.	Penyelesaian Rancangan Keppres/Surat	33	34	31
	a. Grasi	7	11	2
	b. Pengabulan kewarganegaraan	20	23	29
	c. Kehilangan kewarganegaraan	5	-	-
	d. Penolakan pewarganegaraan	1	-	-
TOTAL		516	483	515



b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keluaran kinerja berupa 515 analisis dan pendapat hukum yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden. Dengan demikian, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait.
- 3) Koordinasi yang baik dengan Kementerian dan/atau Lembaga dan/atau stakeholders lainnya.
- 4) Tersedianya dukungan teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain: *Big Data Analytics* Perundang-undangan, JDIH Kementerian Sekretariat Negara, dan *cloud services*.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Keterbatasan sumber daya

Untuk mengatasinya organisasi berupaya untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- mengoptimalkan sumber daya yang tersedia;
- melakukan koordinasi untuk pengisian formasi sumber daya manusia;
- membuka penerimaan magang; dan
- melakukan koordinasi untuk penyediaan sarana dan prasarana.

- 2) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional tergantung Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.

Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.



2. Sasaran Strategis “Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

IKU.4 Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden.

IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti.

IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	2,82 Skala 4	3,10 Skala 4	105,08%
Tahun 2024	3,03 Skala 4	3,15 Skala 4	103,80%
Tahun 2025	3,11 Skala 4	3,13 Skala 4	100,64%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) kinerja selama tahun 2025 sebanyak 606 memorandum laporan Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden terkait analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 9
KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN
DAN KEMASYARAKATAN

NO.	ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN	JUMLAH		
		2023	2024	2025
1.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara dan lembaga pemerintah	568	514	403
2.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga nonpemerintah	348	263	203
Total		916	777	606



b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari keluaran kinerja di atas adalah “Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Hasil pengukuran indeks kualitas analisis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Pengukuran ke-1 : Semester 1 2025
Waktu Pengukuran : Juni 2025
Jumlah Sampel : 30
Hasil Pengukuran : 3,12 Skala 4

Pengukuran ke-2 : Semester 2 2025
Waktu Pengukuran : Desember 2025
Jumlah Sampel : 33
Hasil Pengukuran : 3,14 Skala 4

Formulasi Nilai Akhir : *Last value*
Hasil Pengukuran : 3,13 Skala 4
Akhir

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Peran strategis organisasi dan dukungan serta motivasi dari pimpinan.
- 2) Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan adaptif.
- 3) Terselenggaranya koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dengan unit kerja internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penanganan surat-surat yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Masih terdapat ketidaklengkapan data atas surat yang disampaikan oleh mitra kerja kepada Presiden.

Solusi yang dilakukan yakni melakukan koordinasi dengan mitra kerja untuk segera melengkapi data terhadap surat permohonan yang disampaikan ke Presiden dan pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagi data profil perkumpulan, yayasan, dan perseroan terbatas yang dapat diakses melalui situs web <https://ahu.setneg.go.id>.



- 2) Adanya kekosongan beberapa jabatan sebagai dampak dari mutasi, promosi, tugas belajar, pensiun, dan meninggal dunia.

Solusi yang dilakukan yakni mengoptimalkan dan mendistribusikan beban kerja kepada sumber daya manusia yang ada.

- 3) Masih terdapat *gap* antara rencana kinerja dengan dinamika dan kegiatan.

Solusi yang dilakukan yakni dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat prioritas.

IKU.4 Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,42 Skala 4	3,70 Skala 4	108,09%
Tahun 2024	3,58 Skala 4	3,78 Skala 4	105,68%
Tahun 2025	3,60 Skala 4	3,83 Skala 4	106,39%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja keluaran (*output*) berupa analisis kebijakan yang disampaikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Wakil Presiden. Jumlah capaian *output* pada tahun 2025 terdiri dari 922 dokumen analisis kebijakan dan 7.513 dokumen laporan penanganan pengaduan masyarakat melalui layanan “Lapor Mas Wapres”, dengan rincian *output* sebagai berikut.

TABEL 10
KELUARAN ANALISIS KEBIJAKAN KEPADA WAKIL PRESIDEN

NO.	ANALISIS KEBIJAKAN KEPADA WAKIL PRESIDEN	JUMLAH		
		2023	2024	2025
1.	Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital	541	540	264
	● Ekonomi Keuangan dan Transformasi Digital	240	180	65
	● Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	129	195	105
	● Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Kewilayahan	172	165	94



NO.	ANALISIS KEBIJAKAN KEPADA WAKIL PRESIDEN	JUMLAH		
		2023	2024	2025
2.	Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	792	2.797	438
	● Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Desa	246	1.583	94
	● Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga	-	527	198
	● Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	239	687	96
	● Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	307	329	50
3.	Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan	454	913	220
	● Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan	222	109	80
	● Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM	127	248	86
	● Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Pembangunan Daerah	105	227	54
	Total	1.787	4.250	922

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari 922 keluaran kinerja di atas adalah “Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden”. Hasil capaian kinerja tersebut, seluruhnya digunakan oleh Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan. Hasil pengukuran indeks kualitas analisis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Waktu Pengukuran : Desember 2025
 Hasil Pengukuran : 3,83 Skala 4 dari target 3,60 Skala 4

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Kedudukan strategis Wakil Presiden dalam rangka membantu Presiden untuk merumuskan kebijakan (*policy formulation*), mengoordinasi para pimpinan K/L dan stakeholders lainnya (*coordinator*), serta menguraikan permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah (*debottlenecking*).
- 2) Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap Wakil Presiden dalam membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Komitmen dari pimpinan dan para pegawai untuk memberikan kinerja yang optimal sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Belum terstandarisasinya data dan informasi yang digunakan sebagai bahan analisis dan rekomendasi kebijakan.
- 2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menyusun mekanisme pengelolaan data yang lebih terstruktur, termasuk penetapan standar kebutuhan data, pemanfaatan data internal yang telah diverifikasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang bersumber dari instansi pemerintah maupun mitra kerja.
- 4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah serta mitra kerja terkait untuk memastikan ketersediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, termasuk melalui peninjauan dan penataan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) guna mendukung percepatan akses dan pertukaran data.
- 5) Dinamika kebijakan dan perkembangan isu strategis yang cepat, sehingga memerlukan pembaruan analisis secara berkelanjutan agar rekomendasi kebijakan tetap relevan dan aktual.
- 6) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi pemantauan dan pemutakhiran data dukung penyusunan analisis secara berkala terhadap perkembangan kebijakan dan isu strategis, serta memperkuat mekanisme koordinasi internal dan lintas unit kerja guna memastikan rekomendasi kebijakan yang disusun tetap relevan, responsif, dan aktual sesuai dengan dinamika yang berkembang.

IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	38%	51,56%	107,42%
Tahun 2024	50%	52,12%	102,24%
Tahun 2025	36%	48,99%	136,08%

a) Capaian Kinerja Output

Surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 11.160 surat aduan. Dari surat aduan yang diterima, telah dilakukan analisis menggunakan kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, antara lain:



- 1) pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal;
- 3) substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas;
- 4) substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi;
- 5) substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan
- 6) substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 551 surat pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat/kriteria untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, sesuai dengan hasil analisis dan tindak lanjut pengaduan, diperoleh keluaran kinerja tahun 2025 sebanyak 281 surat pengaduan masyarakat yang telah berhasil diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani melalui kegiatan pemantauan dan koordinasi. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 11
KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT YANG
DISELESAIKAN MENURUT JENIS PERMASALAHAN

NO.	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Penyalahgunaan wewenang	1	6	3
2.	Pelayanan Masyarakat	54	71	32
3.	Korupsi/Pungutan Liar	4	3	3
4.	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	50	33	35
5.	Pertanahan dan Perumahan	127	115	126
6.	Hukum/Peradilan/HAM	39	71	63
7.	Kewaspadaan Nasional	2	2	0
8.	Tata Laksana/Birokrasi	-	-	1
9.	Lingkungan Hidup	8	8	10
10.	Umum	3	15	8
TOTAL		288	324	281



b) Capaian Kinerja *Outcome*

Kinerja *outcome* dari analisis pengaduan masyarakat adalah “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti”. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh kinerja *outcome* sebesar 48,99% dari target 36%, dengan capaian kinerja sebesar 136,08%. Target tahun 2025 mengalami penyesuaian dari semula 51% menjadi 36% dan telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara a.n. Menteri Sekretaris Negara nomor B-34/KSN/S/PR.00.03/12/2025, tanggal 15 Desember 2025. Hasil kinerja ini seluruhnya digunakan dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh Presiden/Wakil Presiden. Formula penilaian IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\left(\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$$

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif.
- 2) Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dengan melakukan berbagai terobosan pola/moda kolaborasi antar instansi pemerintah.
- 3) Partisipasi aktif dalam forum pengelola pengaduan masyarakat baik di pusat maupun daerah.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dari Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi (K/L/D/I) terkait dalam beberapa kasus belum sesuai dengan harapan.

Solusi yang dilakukan yakni mengoptimalkan rapat koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat bersama dengan K/L/D/I terkait, yang diselenggarakan baik secara luring ataupun daring.



- 2) Koordinasi antar K/L/D/I dalam penanganan pengaduan masyarakat yang masih dinilai kurang efektif dan efisien, dan jumlah surat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tidak diterima maupun diterima dalam jangka waktu yang lama oleh K/L/D/I terkait, serta permasalahan tidak diterimanya surat respons dari K/L/D/I terkait kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Solusi yang dilakukan yakni Kementerian Sekretariat Negara berperan aktif dalam mengikuti forum pengelola pengaduan masyarakat di tingkat pusat maupun di daerah. Selain itu Kementerian Sekretariat Negara juga berkesinambungan melanjutkan *Big Data Analytic* (BDA) *use case* Pengaduan Masyarakat untuk meningkatkan kecepatan pengiriman baik surat tindak lanjut pengaduan masyarakat maupun respons dari K/L/D/I terkait.

- 3) Terdapat pengaduan masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan minimnya data dukung.

Solusi yang dilakukan yakni melakukan edukasi kepada Masyarakat melalui diseminasi informasi panduan informasi pengaduan masyarakat (Prima Dumas) yang dapat diakses secara daring.

- 4) Terdapat ego sektoral antar instansi yang berwenang dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Solusi yang dilakukan yakni menyelenggarakan forum koordinasi penanganan pengaduan masyarakat bersama K/L/D/I terkait, baik dilakukan secara daring maupun luring.

3. Sasaran Strategis “Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.6 Tingkat kepuasan peserta program kerja sama selatan-selatan dan triangular.

IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri

IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

IKU.6 Tingkat kepuasan peserta program kerja sama selatan-selatan dan triangular

Capaian Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular sesuai Renstra Tahun 2020-2024

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,3 skala 5	4,58 skala 5	138,79%
Tahun 2024	3,4 skala 5	4,68 skala 5	137,65%



Capaian tingkat kepuasan peserta program kerja sama selatan-selatan dan triangular pada tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2025	4 skala 5	4,54 skala 5	113,50%

a) **Capaian Kinerja Output**

Keluaran kinerja tahun 2025 berupa 8 kegiatan pelatihan internasional, antara lain:

TABEL 12
KEGIATAN PELATIHAN PROGRAM KERJA SAMA
SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

NO.	NAMA KEGIATAN	MITRA	FORMAT	LOKASI	WAKTU	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
1.	South-South and Triangular Cooperation through Indonesia's Youth Entrepreneur and Employment Support Services Programme	Kementerian Pertanian dan IFAD	Luring	Jakarta, Cianjur, Bogor	20 s.d. 26 April 2025	12	India, Kenya, Papua Nugini, Gambia dan Rwanda
2.	International Deposit Insurance Corporation Technical Assistance	LPS Indonesia, Deposit Protection Office of Lao PDR, Bangladesh Bank	Luring	Tangerang	23 s.d. 25 April 2025	17	Laos dan Bangladesh
3.	South-South Triangular Cooperation on Trade and Investment Promotion for African Countries	PPEJP, Kementerian Perdagangan dan JICA	Luring	Jakarta	7 s.d. 20 Juli 2025	20	Kamerun, Kenya, Ghana, Mauritius, Rwanda, Tanzania, Tunisia, dan Indonesia
4.	SSTC Capacity Building Program on Climate Services for Food, Energy, Water, and Health (FEWH) Sectors to Close the Early Gap in Climate Resilience	BMKG dan Colombo Plan	Daring dan Luring	Tangerang	11 s.d. 15 Agustus 2025 (Online) dan 24 s.d. 30 Agustus 2025 (Offline)	17	Bangladesh, Bhutan, Brunei, Filipina, Laos, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Indonesia



NO.	NAMA KEGIATAN	MITRA	FORMAT	LOKASI	WAKTU	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
5.	International Workshop on Electoral Efficiency and Sustainability	KPU, NAM CSSTC, dan IDEA International	Luring	Bandung	19 s.d. 24 Oktober 2025	38	Negara Afrikas (Afrika Selatan, Ghana, Kamerun, Kenya, Kongo, dan Zimbabwe) dan 11 Negara Asia-Pasifik (Australia, Filipina, Kepulauan Solomon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Papua Nugini, Samoa, Sri Lanka, Vanuatu, dan Indonesia)
6.	FP2030 Regional Focal Points / South-South Learning Workshop	Kemendukbangga /BKKBN dan UNFPA	Luring	Bali	7 s.d. 11 Oktober 2025	75	Australia, Bangladesh, Fiji, Filipina, India, Kamboja, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam, dan Indonesia
7.	3rd Exchange SSTC on Renewable Energy and Geothermal (Indonesia, Kenya and Germany)	Kementerian ESDM dan GIZ	Luring	Manado dan Tomohon	8 s.d. 15 November 2025	19	Kenya
8.	1st Exchange of South-South and Triangular Cooperation on Inclusion and Economic Empowerment for Person with Disabilities	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov DI Yogyakarta, dan GIZ	Luring	Yogyakarta	24 s.d. 30 November 2025	21	Yordania, Suriah, Jerman, dan Indonesia

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari keluaran di atas menghasilkan *outcome* berupa “Tingkat kepuasan peserta program kerja sama selatan-selatan dan triangular”. Pengukuran IKU ini dilakukan menggunakan survei kepada 202 responden pengguna layanan program kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) dengan menggunakan mekanisme kuesioner elektronik. Hasil survei merupakan penghitungan terhadap respon langsung (*immediate response*) para peserta atas kepuasan terhadap program KSST. Hasil pengukuran tahun 2025 diperoleh capaian kinerja indeks kepuasan sebesar **4,54 Skala 5** dari target 4,0 Skala 5.



Rincian hasil survei menurut dimensi penilaian kinerja adalah sebagai berikut.

No.	Komponen Penilaian Kepuasan	Nilai 2025
1.	Metode dan Alat Pembelajaran	4,60
2.	Fasilitas Training	4,41
3.	Manajemen Training	4,54
4.	Interaksi dengan Peserta Lain	4,61
Hasil Penilaian		4,54

Berdasarkan hasil penilaian di atas, kinerja tingkat kepuasan peserta program kerja sama selatan-selatan dan triangular telah diselenggarakan dengan Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Terselenggaranya peran Kementerian Sekretariat Negara dalam Kelompok Kerja Hibah dan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan.
- 2) Kegiatan pelatihan telah diselenggarakan secara luring yang dinilai meningkatkan tanggapan positif peserta asing terhadap pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai topik yang diangkat pada program KSST sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan program pelatihan.
- 3) Terdapat mitra pembangunan yang memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan pelatihan internasional.
- 4) Meningkatnya intensitas dalam melakukan peninjauan potensi mitra triangular, baik yang berasal dari mitra reguler kerja sama teknik luar negeri maupun pihak lain, termasuk BUMN/BUMD/swasta.
- 5) Melakukan pelembagaan dokumen standarisasi yang dibutuhkan dalam implementasi kegiatan, termasuk standarisasi perikatan kerja sama, standarisasi agenda pelatihan, dan standarisasi mekanisme pembiayaan.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Terdapat sejumlah kegiatan belum dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sebagai implikasi kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Upaya yang telah dilakukan adalah menginisiasi program baru dengan mitra donor ataupun mitra K/L lain agar target jumlah program tetap dapat terpenuhi.

- 2) Belum terdapat komitmen yang sama untuk memprioritaskan penganggaran pelatihan internasional di mitra pelaksana K/L.

Organisasi secara proaktif telah melakukan upaya negosiasi kontribusi dengan mitra pembangunan dan/atau melakukan penyesuaian pelaksanaan sesuai dengan sumber daya anggaran yang tersedia.

IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,3 skala 5	4,11 skala 5	124,55%
Tahun 2024	3,4 skala 5	4,34 skala 5	127,65%
Tahun 2025	4 skala 5	4,15 skala 5	103,75%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran kinerja (*output*) pada tahun 2025 adalah layanan kerja sama teknik luar negeri dengan mitra pembangunan sebagai berikut.

- 1) Mitra pembangunan bilateral sebanyak 32 mitra.
- 2) Mitra pembangunan multilateral sebanyak 81 mitra.
- 3) Mitra pembangunan organisasi internasional non pemerintah sebanyak 36 mitra.
- 4) Mitra K/L/D/I sebanyak 245 mitra.



TABEL 13
KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA
TEKNIK LUAR NEGERI

NO.	KELUARAN ANALISIS	TAHUN		
		2023	2024	2025
1.	Kegiatan koordinasi KTLN	34 Kegiatan	30 Kegiatan	38 Kegiatan
2.	Surat Persetujuan Tenaga Asing	1.205 Dokumen	1.228 Dokumen	1.548 Dokumen
3.	Fasilitasi KST	3.983 Dokumen	3.054 Dokumen	5.197 Dokumen
4.	Pertimbangan KST	21 Dokumen	24 Dokumen	25 Dokumen
5.	Penawaran beasiswa	162 Dokumen	177 Dokumen	183 Dokumen

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari keluaran di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri”. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada 50 responden pengguna layanan dan mitra kerja sama. Hasil pengukuran indeks efektivitas sebesar 4,15 Skala 5 dari target 4,0 Skala 5.

No.	Aspek Penilaian	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
1.	Aspek Kebijakan	4,29	4,4	4,11
2.	Aspek Profesionalisme SDM	4,12	4,4	4,28
3.	Aspek Infrastruktur Pelayanan	3,99	4,3	4,22
4.	Aspek Pengaduan	4,11	4,34	4,04
5.	Aspek Koordinasi Substansi	4,11	4,28	4,10
Hasil Penilaian		4,11	4,34	4,15

Berdasarkan hasil penilaian di atas, kinerja koordinasi kerja sama teknik luar negeri tahun 2025 telah diselenggarakan dengan Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Terselenggaranya peran strategis Kementerian Sekretariat Negara sebagai Sekretariat Panitia Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan national *focal point* pengelolaan kegiatan kerja sama teknik luar negeri bersama dengan K/L terkait.



- 2) Terselenggaranya peran Kementerian Sekretariat Negara sebagai mitra pengelolaan kegiatan kerja sama luar negeri, termasuk program Australia Awards Indonesia, Manaaki New Zealand Scholarship, dan *World Friends Korea Volunteer*.
- 3) Terselenggaranya penyederhanaan dan digitalisasi layanan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.
- 4) Diseminasi informasi pelayanan/fasilitasi tenaga asing, beasiswa dan fasilitasi kerja sama teknik telah berjalan optimal sehingga pengguna layanan dapat melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen dengan lebih mudah.
- 5) Tersusunnya dokumen pemetaan ekosistem kerja sama pembangunan internasional Indonesia.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tingginya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta kebutuhan akan tenaga ahli yang tidak selalu tersedia.

Solusi yang dilakukan yakni dengan meningkatkan kolaborasi dengan mitra pembangunan dan mitra pelaksana K/L/D/I dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama teknik luar negeri.

- 2) Risiko keamanan data dan serangan siber yang dapat mengganggu kelancaran koordinasi dan kepercayaan mitra.

Solusi yang dilakukan yakni dengan melanjutkan transformasi digital secara berkelanjutan dalam pengelolaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.

IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,62 skala 5	4,13 skala 5	114,09%
Tahun 2024	3,64 skala 5	4,64 skala 5	118,96%
Tahun 2025	4,00 skala 5	4,40 skala 5	110,25%



a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja tahun 2025 adalah layanan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, yakni dalam bentuk dokumen Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) sebanyak 18.556 dokumen dengan jumlah peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 48.600 peserta, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat persetujuan pembatalan sebanyak 119 Surat dengan peserta sebanyak 197 orang;
- 2) Surat persetujuan perpanjangan sebanyak 15 Surat dengan peserta sebanyak 22 orang;
- 3) Surat Persetujuan Ralat sebanyak 684 surat dengan peserta sebanyak 2.904 orang;
- 4) Surat Permohonan disetujui 17.700 surat dengan peserta sebanyak 45.269 orang; dan
- 5) Surat Penolakan sebanyak 38 Surat dengan peserta sebanyak 208 orang.

TABEL 14
JENIS KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
TAHUN 2025

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH SURAT	JUMLAH PESERTA
1.	PDLN Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, Internasional/Penjajakan Kerja Sama	5.265	12.895
2.	PDLN Misi Olahraga/Kontingen Atlet	562	7.902
3.	PDLN Seminar/Simposium/Workshop	3.808	6.251
4.	PDLN Training/Pelatihan	2.948	6.134
5.	Pembinaan/Pengawasan/Inspeksi/FAT/Renmone v Perwakilan	1.080	3.233
6.	PDLN Kunjungan Menteri/Kepala Lembaga	604	3.088
7.	PDLN Studi Banding/Benchmarking	441	2.097
8.	PDLN Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi Investasi	382	1.339
9.	PDLN Doktoral	1.038	1.048
10.	PDLN Penelitian	730	1.031
11.	PDLN Master	823	908
12.	PDLN Seremonial/Penganugerahan Penghargaan/Penandatanganan	229	604
13.	PDLN Tim Kunjungan Presiden/Wapres	92	498
14.	PDLN Misi Sosial/Kemanusiaan	55	409
15.	Forum Internasional Lintas Kementerian/Lembaga	150	336



NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH SURAT	JUMLAH PESERTA
16.	PDLN Tenaga Ahli Indonesia	75	154
17.	PDLN Penempatan/Pengumandahan	49	115
18.	PDLN Sarjana	15	66
19.	PDLN Postdoktoral	32	32
20.	PDLN Kurir Diplomatik	11	23
21.	Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan	5	15
22.	Diploma	2	12
23.	PDLN Event Internasional	3	5

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keluaran (*output*) di atas menghasilkan *outcome* berupa “Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri”. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada pengguna layanan. Dari lembar survei elektronik yang disebar, terkumpul 100 responden pengguna layanan. Hasil pengukuran tahun 2025 sebesar 4,40 Skala 5 dari target 4,0 Skala 5.

Rincian hasil survei menurut unsur penilaian kinerja meliputi:

TABEL 15
RINCIAN HASIL PENILAIAN PENANGANAN ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Rincian hasil survei menurut unsur penilaian kinerja meliputi:

No.	Unsur	Indeks
1.	Aspek Kebijakan	4,47 Skala 5
2.	Aspek Profesionalisme SDM	4,47 Skala 5
3.	Aspek Infrastruktur Pelayanan	4,38 Skala 5
4.	Aspek Pelayanan Pengaduan	4,28 Skala 5
	Nilai Akhir	4,40 Skala 5

Berdasarkan hasil penilaian di atas, kinerja pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri tahun 2025 telah diselenggarakan dengan Sangat Baik.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Peran strategis Kementerian Sekretariat Negara dalam mengoordinasikan persetujuan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh K/L/D/I.
- 2) Digitalisasi layanan perizinan PDLN melalui aplikasi SIMPEL yang terus ditingkatkan.
- 3) Terselenggaranya diseminasi kebijakan PDLN melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis SIMPEL kepada seluruh K/L/D/I.
- 4) Koordinasi yang telah terjalin baik bersama para *Focal Point* SIMPEL di Kementerian/Lembaga.
- 5) Kesiapan dan profesionalisme para pengelola layanan dalam menangani permohonan perjalanan dinas luar negeri.
- 6) Tersedianya kanal layanan aduan dan konsultasi melalui simpel@setneg.go.id.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Capaian *outcome* pelaksanaan layanan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri telah menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun demikian, dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus dikembangkan, antara lain:

- 1) Gangguan teknis pada sistem (antara lain seperti *server down*, *bug*) yang dapat memperlambat proses perizinan dan menimbulkan ketidakpuasan pengguna, serta adanya ketergantungan pada penyedia teknologi eksternal yang dapat menimbulkan kendala jika terjadi perubahan pada aplikasi.

Solusi yang dilakukan yakni dengan melanjutkan transformasi digital secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri.

- 2) Tingginya frekuensi mutasi atau rotasi *Person In Charge* (PIC) di setiap K/L, sehingga bimtek harus dilakukan berulang kali dan membutuhkan banyak sumber daya.

Solusi yang dilakukan yakni dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala terkait kebijakan PDLN dan penggunaan aplikasi SIMPEL kepada PIC pada unit *Focal Point* di Kementerian/Lembaga, guna menjaga kesinambungan pemahaman dan kualitas pelaksanaan layanan, serta meminimalkan dampak pergantian personel PIC terhadap kualitas layanan administrasi perizinan PDLN.



4. Sasaran Strategis “Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri.

IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,00 skala 4	3,58 skala 4	119,33%
Tahun 2024	3,09 skala 4	3,52 skala 4	113,92%
Tahun 2025	3,11 skala 4	3,60 skala 4	115,76%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) kinerja tahun 2025 pada IKU ini terdiri atas:

- 1) Layanan administrasi Pejabat Negara, 134 dokumen;
 - 2) Layanan administrasi Pejabat Pemerintah, sebanyak 56 dokumen; dan
- Rincian naskah masing-masing dokumen keluaran tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 16
KELUARAN DOKUMEN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	2023	2024	2025
Layanan administrasi Pejabat Negara		129	174	134
1.	Pengangkatan	20	17	24
2.	Pemberhentian	41	42	-
3.	Pemberhentian dan Pengangkatan	21	35	29
4.	Pemberhentian dengan Hak Pensiun	-	6	34
5.	Pensiun	14	30	18
6.	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	6	6	5
7.	Pemberhentian Antar Waktu	4	13	3
8.	Perpanjangan	5	4	3



NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	2023	2024	2025
9.	Pemberhentian dan Penunjukan	4	7	-
10.	Pengangkatan Antar Waktu	2	4	-
11.	Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu	1	2	1
12.	Pembentukan Pansel	2	2	8
13.	Penunjukan	-	1	1
14.	Penggantian	-	1	2
15.	Perpanjangan, Pemberhentian, dan Pengangkatan	2	1	-
16.	Pembubaran	-	1	-
17.	Pembentukan	-	1	-
18.	Pengaktifan	-	1	-
19.	Pemberhentian dan Perpanjangan	1	-	-
20.	Pemberhentian Sementara	1	-	-
21.	Pemberhentian dan Pembatalan Pemberhentian	1	-	-
22.	Perpanjangan dan Perubahan Nomenklatur	1	-	-
23.	Perpanjangan dan Pengangkatan	1	-	4
24.	Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan	1	-	-
25.	Pemberhentian dan Pensiun	1	-	-
26.	Penetapan	-	-	1
27.	Penugasan	-	-	1
Layanan administrasi Pejabat Pemerintahan		90	112	56
1.	Pengangkat dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama, Pejabat Lembaga Non Struktural dan Pejabat lainnya yang kewenangannya berada pada Presiden	61	87	38
2.	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya berada pada Presiden	13	12	8
3.	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya berada pada Presiden	16	13	10
Layanan administrasi Personel TNI dan Polri		128	135	139
1.	Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut	3	2	1
2.	Penetapan Pensiun Mantan Panglima TNI	2	1	-
3.	Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati TNI & Polri	33	27	34
4.	Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes Pol	5	5	5
5.	Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta	6	8	10
6.	Kenaikan Pangkat Tituler	3	2	2
7.	Kenaikan Pangkat Istimewa/Hor	-	-	5



NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	2023	2024	2025
8.	Pengangkatan Perwira Pertama	14	2	18
9.	Pemberhentian dengan Hormat Pati TNI & Polri	27	16	26
10.	Pemberhentian Dengan Hormat Pamen TNI & Polri	24	32	27
11.	Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal & Tewas	8	27	8
12.	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pamen/ Pati	1	7	2
13.	Dipertahankan dalam Dinas Aktif (DDA)	2	5	0
14.	Penurunan Pangkat dalam Golongan Pati TNI	-	-	1
JUMLAH KESELURUHAN		347	421	329

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan *outcome* berupa “Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri”. Rincian hasil pengukuran pada tiap layanan adalah sebagai berikut.

- 1) Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara
 - Waktu Pelaksanaan : Sepanjang tahun 2025
 - Jumlah Responden : 144 orang
 - Asal Responden : Penerima manfaat layanan
 - Formulasi Nilai Akhir : Kumulatif
 - Hasil Pengukuran : 3,69 Skala 4 dari target 3,45 Skala 4
 - Predikat Layanan : Sangat Baik
- 2) Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan
 - Waktu Pelaksanaan : Sepanjang tahun 2025
 - Jumlah Responden : 638 orang
 - Asal Responden : Penerima manfaat
 - Formulasi Nilai Akhir : Kumulatif
 - Hasil Pengukuran : 3,58 Skala 4 dari target 3,4 Skala 4
 - Predikat Layanan : Sangat Baik
- 3) Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri
 - Waktu Pelaksanaan : Oktober 2025
 - Jumlah Responden : 100 Orang
 - Asal Responden : Pejabat/pegawai pengguna layanan pada:
 - Markas Besar TNI
 - Markas Besar Polri
 - Kementerian Pertahanan
 - Lembaga Pendidikan TNI/Polri
 - Personel TNI/Polri di lingkungan Kemensetneg
 - Formulasi Nilai Akhir : Kumulatif
 - Hasil Pengukuran : 3,55 Skala 4 dari target 3,20 Skala 4
 - Predikat Layanan : Sangat Baik



Hasil pengukuran IKU.9 diperoleh dari nilai rata-rata dari indeks kepuasan pada tiga layanan di atas. Nilai rata-rata indeks kepuasan pada tahun 2025 adalah sebesar 3,60 Skala 4 dari target 3,11 Skala 4. Hasil ini menunjukkan layanan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan personel TNI dan Polri pada tahun 2025 telah diselenggarakan dengan kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Sistem informasi layanan yang telah terintegrasi dengan data kependudukan.
- 2) Komunikasi dan kerja sama yang terjalin baik antara Kementerian Sekretariat Negara dengan instansi terkait.
- 3) Tersedianya layanan informasi dan pengaduan yang cepat, responsif dan *real time* melalui media sosial dan aplikasi *chat*.
- 4) Pelayanan yang telah diberikan selama ini tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun atau gratis.
- 5) Kompetensi pegawai yang memadai dalam memberikan pelayanan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kurangnya antusiasme pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan pengguna layanan

Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan review terhadap formulir survei kepuasan masyarakat serta menyediakan tools survei yang *user friendly* sehingga dapat meminimalisir keengganan pengguna layanan dalam mengisi survei dimaksud.

- 2) Belum adanya sistem informasi yang terkoneksi langsung dengan instansi terkait.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual serta mengajukan permohonan pengadaan sistem informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait.

- 3) Kecepatan pemahaman dari pengguna layanan/instansi pengusul dan respon pengguna layanan/instansi pengusul terhadap permintaan kelengkapan data belum optimal.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi pengusul.



IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,00 skala 4	3,70 skala 4	123,33%
Tahun 2024	3,04 skala 4	3,73 skala 4	122,70%
Tahun 2025	3,04 skala 4	3,74 skala 4	123,03%

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2025 keluaran (*output*) kinerja dari IKU ini adalah 135 naskah Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden. Rincian naskah Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 17
KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN
ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN
TANDA KEHORMATAN

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	2024		2025	
		Jumlah Dokumen	Jumlah Penerima	Jumlah Dokumen	Jumlah Penerima
1.	Penganugerahan Gelar Pahlawan	-	5	1	10 Orang-
2.	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Medali Kepeloporan	1	1 Orang	-	-
3.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	57	21.303 Orang	49	16.162 Orang
4.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	79	247.302 Orang	83	408.668 Orang
5.	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	3	17 Instansi	2	19 Satuan
TOTAL		140 Keppres	268.606 Orang/ 17 Instansi	135 Keppres	424.859 Orang/ 19 Satuan



b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan *outcome* berupa “Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan”.

Waktu Pelaksanaan	: Oktober 2025
Jumlah Responden	: 119 Orang
Asal Responden	: Pejabat/pegawai pengguna layanan pada: - Lembaga Negara - Kementerian Negara/Lembaga - Mabes TNI - Mabes Polri - Pemerintah Daerah
Formulasi Nilai Akhir	: Kumulatif
Hasil Pengukuran	: 3,74 Skala 4 dari target 3,04 Skala 4
Predikat Layanan	: Sangat Baik

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Tersosialisasinya sistem dan prosedur layanan administrasi penganugerahan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 2) Terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan terkait lainnya; dan
- 3) Terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto “Tepat, Cepat, dan Cermat”.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Online yang belum terealisasi.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan percepatan penyelesaian SIM GTK *Online*.
- 2) Data dukung dan rencana permohonan layanan tidak disampaikan tepat waktu.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pengusul.



- 3) Masih ada instansi yang belum mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya sehingga dapat menghambat proses perencanaan pengadaan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara telah menerapkan Standar Pelayanan berdasarkan SP No. 1/GTK/2022 dan mekanisme pengusulan sesuai dengan Pedoman Dewan GTK Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman.

5. Sasaran Strategis “Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden

IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	4,83 skala 6	5,34 skala 6	110,56%
Tahun 2024	4,88 skala 6	5,41 skala 6	110,86%
Tahun 2025	4,90 skala 6	5,44 skala 6	111,02%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja dari IKU ini adalah layanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah kegiatan yang diselenggarakan terkait layanan ini sebanyak 4.513 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.



TABEL 18
KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN
KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO.	PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Jamuan	2.631	2.326	3.671
2.	Tata Graha	623	211	69
3.	Dekorasi	135	286	411
4.	Kesenian	370	122	157
5.	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	1.814	380	205
TOTAL		5.573	3.325	4.513

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2025 adalah sebesar 5,44 Skala 6 dari target 4,90 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden sebesar 5,15 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6.
- 2) Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden sebesar 5,72 Skala 6 dari target 4,85 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Komitmen pimpinan dan pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 2) Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal; dan
- 3) Mekanisme pengendalian kualitas layanan yang diterapkan secara berkelanjutan untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerumahtanggaan diinventarisasi secara manual dan pengadaannya bergantung pada permintaan VVIP.

Untuk mengatasinya, organisasi melakukan monitoring/inspeksi secara berkala untuk menjamin keandalan perlengkapan kerumahtanggaan.

- 2) Keterbatasan SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan kerumahtanggaan VVIP yang bebas kesalahan (*zero mistake*).

Untuk mengatasinya, organisasi menugaskan pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan pelayanan kerumahtanggaan.

- 3) Dinamika kegiatan VVIP yang tinggi, sehingga menuntut kecepatan dan adaptasi pelayanan yang optimal.

Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.

- 4) Keterbatasan ketersediaan barang atau layanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasinya melalui pemetaan kebutuhan sejak tahap perencanaan, serta menyiapkan alternatif penyedia atau pengadaan pendukung apabila diperlukan.

- 5) Perbedaan standar keamanan dan pengaturan fasilitas pada lokasi kegiatan, khususnya di luar kantor atau di daerah, berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran layanan kerumahtanggaan.

Untuk mengatasinya dilakukan koordinasi awal dengan unsur pengamanan dan pengelola lokasi, serta penyesuaian pengaturan fasilitas sesuai standar yang berlaku.

IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	4,73 skala 6	5,27 skala 6	111,42%
Tahun 2024	4,78 skala 6	5,31 skala 6	111,09%
Tahun 2025	4,80 skala 6	5,21 skala 6	108,54%



a) **Capaian Kinerja *Output***

Capaian kinerja *output* berupa (1) layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan (2) layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden. Jumlah kegiatan berkenaan dengan dua layanan dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden
 - Pemberian dukungan layanan keprotokolan kepada Presiden dengan lancar terkait penyiapan acara harian/resmi/penting lainnya Presiden, penyiapan acara kunjungan Presiden ke daerah, penyiapan acara kunjungan Presiden ke luar negeri, termasuk pada penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden serta penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden, dengan rincian pada tabel berikut.

TABEL 19
KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Penyiapan acara harian/resmi/penting lainnya Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden	340 kegiatan	493 kegiatan	465 kegiatan
2.	Penyiapan acara kunjungan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden ke daerah	60 kegiatan	52 kegiatan	33 kegiatan
3.	Penyiapan acara kunjungan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden ke luar negeri	13 kegiatan	11 kegiatan	35 kegiatan
4.	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden	38 kegiatan	68 kegiatan	-
5.	Penyiapan acara penerimaan tamu negara atau tamu asing	-	-	37 kegiatan
6.	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden	64 kegiatan	59 kegiatan	28 kegiatan
TOTAL		515 kegiatan	683 kegiatan	598 kegiatan

- Pemberian dukungan layanan pers dan media kepada Presiden dengan lancar terkait pembuatan transkrip, rilis video, peliputan kegiatan, pemantauan dan analisis harian media serta pendokumentasian rekaman audio amanat, sambutan, dialog, keterangan pers Presiden, dengan rincian sebagai berikut.



TABEL 20
KELUARAN LAYANAN PERS DAN MEDIA KEPADA PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Pembuatan transkrip kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	631 buah	376 buah	221 buah
2.	Rilis video kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	937 buah	688 buah	534 buah
3.	Pemantauan dan analisis harian media	2.469 buah	2.449 buah	8.909 buah
4.	Pendokumentasian rekaman audio amanat, sambutan, dialog, keterangan pers Presiden dan/atau Ibu Negara	631 buah	365 buah	221 buah
5.	Hasil peliputan kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	1.276 buah	1.000 buah	741 buah
TOTAL		5.944 buah	4.878 buah	10.626 buah

- 2) Layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden
- Pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden

TABEL 21
KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA WAKIL PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Kunjungan Tamu Negara	3	3	1
2.	Kunjungan ke Luar Negeri	5	5	2
3.	Kunjungan Kerja ke Daerah	76	76	99
4.	Acara di Pusat (Jakarta)	257	257	221
5.	Kunjungan Kehormatan/Audiensi	143	143	290
TOTAL		500	484	613



- Notula kegiatan Wakil Presiden

TABEL 22
KELUARAN NOTULA KEGIATAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Audiensi	36	31	290
2.	Acara Seremonial	64	92	-
3.	Rapat/Rapat Intern	11	-	2
4.	Kunjungan Kerja	83	10	99
TOTAL		194	133	391

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2025 adalah sebesar **5,21 Skala 6** dari target 4,80 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden sebesar 5,12 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6; dan
- 2) Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden sebesar 5,30 Skala 6 dari target 4,65 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan layanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden telah diselenggarakan dengan kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan;
- 2) Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 3) Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal; dan
- 4) Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan layanan.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dinamika kegiatan VVIP yang tinggi, sehingga menuntut kecepatan dan adaptasi pelayanan yang optimal.

Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.

- 2) Keterbatasan SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan keprotokolan serta pers dan media yang bebas kesalahan (*zero mistake*).

Untuk mengatasinya, organisasi menugaskan pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan pelayanan keprotokolan serta pers dan media.

IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	4,63 skala 6	5,37 skala 6	115,98%
Tahun 2024	4,63 skala 6	5,20 skala 6	112,31%
Tahun 2025	4,70 skala 6	5,24 skala 6	111,49%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja *output* pada IKU adalah:

- 1) Layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden, dengan rincian:

TABEL 23
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PRESIDEN

NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Terlaksananya kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara yang dipublikasikan, terdiri dari:			
	• pembuatan siaran pers	1324 buah	975 buah	1.221 buah
	• pembuatan foto rilis	37.095 buah	22.683 buah	16.326 buah
	• pembuatan video rilis	937 buah	688 buah	534 buah



NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
2.	Pelaksanaan siaran langsung acara/kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara pada YouTube Sekretariat Presiden	257 buah	230 buah	207 buah
3.	Cetak foto kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara	1000 buah	143 buah	47 buah
4.	Pembuatan permohonan dan pencetakan ID Wartawan Istana	500 buah	600 buah	550 buah
TOTAL		41.113 buah	25.319 buah	18.885 buah

- 2) Layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden, dengan rincian:

TABEL 24
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN
DOKUMENTASI KEGIATAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1.	Layanan Kewartawanan	340	269	467
	• Dalam kota	237	203	111
	• Luar kota	90	62	77
	• Luar negeri	13	4	4
	• Pencetakan ID	-	-	275
2.	Diseminasi Informasi			
	Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui <i>website</i>	849	685	542
	Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui media sosial	3.327	1.973	1.585
	• Facebook	845	620	551
	• Twitter	768	217	-
	• Instagram	937	673	577
	• YouTube	777	451	406
	• Tiktok	-	12	51
	Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui Majalah Mersela	1	1	-
3.	Peliputan dan Dokumentasi			
	Foto dan video kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/ Suami Wakil Presiden	555	516	612
	• Foto dan video Wakil Presiden	414	377	440
	• Foto dan video Istri Wakil Presiden	32	28	51



NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
	• Foto dan video Sekretariat Wakil Presiden	109	111	121
	Transkrip kegiatan Wakil Presiden	186	157	-
	Audio kegiatan Wakil Presiden	306	349	233
	• Pidato/sambutan Wakil Presiden	186	157	106
	• Presscon/Doorstop/Keterangan pers	92	121	70
	• Greetings	21	41	52
	• Audiensi/wawancara	7	30	2
	• Rapat	-	-	-
4.	Layanan permohonan foto/video dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden/Kesekretariatan (online	197	97	101
	• Tatap Muka	-	-	10
	• Online	208	97	91
TOTAL		5.820	4.047	3.540

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2025 adalah sebesar 5,24 Skala 6 dari target 4,70 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut.

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden sebesar 5,19 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6.
- 2) Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden sebesar 5,29 Skala 6 dari target 4,45 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan.
- 2) Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal.
- 4) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat optimal.



- 5) Kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam merespons kebutuhan kerja lapangan, baik dari sisi teknis, komunikasi, maupun pengambilan keputusan operasional, yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dinamika kegiatan VVIP yang tinggi, sehingga menuntut kecepatan dan adaptasi pelayanan yang optimal.

Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.

- 2) Frekuensi kegiatan yang tinggi menghasilkan peningkatan pada data dokumentasi (foto, video, dan materi pendukung) sehingga memerlukan pengelolaan lebih terstruktur agar tetap mudah diakses dan dimanfaatkan lintas unit.

Untuk mengatasinya dengan menerapkan pengelompokan dokumentasi berbasis kegiatan dan tema kebijakan, serta memperkuat tata kelola pengarsipan internal untuk memastikan ketersediaan data secara cepat dan akurat.

Seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan Wakil Presiden di berbagai daerah, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat tetap selaras dengan kondisi dan isu setempat, sekaligus konsisten dengan isu kebijakan nasional.

Untuk mengatasinya melalui penguatan proses penyiapan substansi sebelum kegiatan, serta penyesuaian format penyampaian informasi agar lebih kontekstual, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat di lokasi kegiatan.

IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	4,30 skala 6	5,33 skala 6	123,95%
Tahun 2024	4,32 skala 6	5,60 skala 6	129,63%
Tahun 2025	4,32 skala 6	5,38 skala 6	124,54%



a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* pada IKU ini adalah 284 kegiatan pengamanan VVIP, diantaranya pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu di Jakarta, daerah, maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing. Rincian kegiatan pengamanan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

TABEL 25
KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP

NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH (KEGIATAN)		
		2023	2024	2025
1.	Pengamanan Presiden beserta Ibu	243	176	114
	● Jakarta	142	88	62
	● Daerah	88	82	36
	● Luar Negeri	13	6	16
2.	Pengamanan Wakil Presiden beserta Ibu	187	171	151
	● Jakarta	117	107	78
	● Daerah	63	60	69
	● Luar Negeri	7	4	4
3.	Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing	10	8	19
TOTAL		440	355	284

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan *output* di atas menghasilkan *outcome* berupa “Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden”.

Jumlah Responden : 28 Orang
 Asal Responden : Perwakilan perangkat kepresidenan yang melekat dan unsur pengamanan wilayah
 Hasil Pengukuran : 5,38 Skala 6 dari target 4,32 Skala 6
 Predikat Layanan : Sangat Baik

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik, yaitu sebanyak 284 kegiatan VVIP seluruhnya aman, bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir secara fisik maupun non fisik.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.
- 2) Mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP.
- 3) Terjalannya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing secara optimal.
- 4) Terlaksananya penerapan Standar Operasional Prosedur No. 39/2024 dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan sangat dinamis.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan.

- 2) Terbatasnya sarana transportasi VVIP.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan institusi TNI dalam rangka menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.

6. Sasaran Strategis “Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi

IKU.16 Indeks Sistem Merit

IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan

IKU.19 Indeks Maturitas SPBE



IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	82,06	87,70	106,87%
Tahun 2024	82,10	81,61	99,40%
Tahun 2025	81,10	83,36	102,79%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja *output* pada IKU ini adalah tersusunnya dokumen penilaian reformasi birokrasi yang terdiri dari RB General dan RB Tematik. Penilaian RB General terdiri dari 3 komponen besar yaitu (1) Strategi Pelaksanaan RB General; (2) Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi; dan (3) Capaian Strategis Reformasi Birokrasi.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks Reformasi Birokrasi”. Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Pada tahun 2025 dilakukan pengukuran reformasi birokrasi tahun 2024, dengan perubahan metode pengukuran melalui pengukuran RB General dan RB Tematik. Adapun RB General diukur melalui rencana aksi, evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi, dan 24 indeks reformasi birokrasi.

Hasil pengukuran IKU.15 masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2024 sebagaimana disampaikan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB nomor B/445/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 83,36. Adapun hasil pengukuran tahun 2025 belum tersedia pada saat LKj ini disusun. Rincian hal pengukuran IKU.15 adalah sebagai berikut.

TABEL 26
HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2024
A.	RB General	100	81,87
B.	RB Tematik	10	1,49
C.	Indeks RB	110	83,36
			(A-)



Apabila capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target indeks reformasi birokrasi tahun 2025 sebesar 81,10, maka capaiannya adalah sebesar 102,79%. Target tahun 2025 mengalami penyesuaian dari semula 85 menjadi 81,10 dan telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara a.n. Menteri Sekretaris Negara nomor B-34/KSN/S/PR.00.03/12/2025, tanggal 15 Desember 2025.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) komitmen/dukungan pimpinan dalam proses evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) koordinasi yang intensif dengan tim pelaksana dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta *Person In Charge* (PIC) indeks-indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi terkait pengumpulan data dukung reformasi birokrasi;
- 3) terselenggaranya *sharing knowledge* dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan indeks-indeks dalam reformasi birokrasi baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi maupun Kementerian Lembaga terkait; dan
- 4) sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ini adalah terdapat dinamika kebijakan dari Kementerian PANRB terkait dengan mekanisme dan cakupan penilaian RB Tematik dari semula RB Tematik dihitung berdasarkan capaian nasional serta difokuskan pada tema-tema yang paling relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara antara lain Pengentasan Kemiskinan dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang berfokus pada Penanganan *Stunting* berubah menjadi seluruh tema RB Tematik ditetapkan sebagai objek penilaian. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan RB Tematik yang sebelumnya telah disusun.

Untuk mengatasinya, melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pengoptimalan pelaksanaan RB Tematik pada Kementerian Sekretariat Negara dan memaksimalkan pencapaian RB General serta penyesuaian Rencana Aksi RB Tematik pada seluruh aspek dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.



IKU.16 Indeks Sistem Merit

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
Tahun 2024	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
Tahun 2025	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja *output* IKU indeks sistem merit berupa dokumen penilaian mandiri sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang telah diverifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dokumen penilaian sistem merit mencakup aspek:

- 1) Perencanaan kebutuhan ASN
- 2) Pengadaan ASN
- 3) Pengembangan karier
- 4) Promosi dan mutasi
- 5) Manajemen kinerja
- 6) Penggajian, penghargaan, dan disiplin
- 7) Perlindungan dan pelayanan
- 8) Sistem informasi.

Selanjutnya, hasil penilaian aspek sistem merit tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 38/KEP.KASN/C/XI/2022, tanggal 29 November 2022, tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sesuai hasil penilaian tersebut, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik) dengan capaian nilai sebesar 390 dari skala nilai sebesar 400. Adapun penilaian tersebut berlaku untuk 2 tahun, yaitu tahun 2022 s.d. 2024. Hasil penilaian tahun 2025 sampai dengan saat ini belum rilis, sehingga penilaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2025 masih menggunakan hasil penilaian periode sebelumnya.

Keluaran lain terkait dengan pelaksanaan IKU.16 Indeks Sistem Merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- 2) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.



b) Capaian Kinerja *Outcome*

Kinerja *outcome* dari keluaran (*output*) penilaian sistem merit adalah indeks sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan rincian hasil penilaian sistem merit sebagai berikut.

TABEL 27
HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NO.	ASPEK PENILAIAN SISTEM MERIT	NILAI YANG DILAPORKAN		
		2023	2024	2025
1.	Perencanaan kebutuhan ASN	40	40	40
2.	Pengadaan ASN	40	40	40
3.	Pengembangan karier	120	120	120
4.	Promosi dan mutasi	32.5	32.5	32.5
5.	Manajemen kinerja	80	80	80
6.	Penggajian, penghargaan, dan disiplin	37.5	37.5	37.5
7.	Perlindungan dan pelayanan	16	16	16
8.	Sistem informasi	24	24	24
TOTAL		390	390	390

Capaian indeks sistem merit tahun 2024 yang digunakan sebagai referensi penilaian tahun 2025 sebesar 390 menunjukkan kualitas tata kelola SDM di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan meritokrasi yaitu dengan tersedianya suksesor/calon pemimpin yang diperoleh dari pengelolaan manajemen talenta yang berkualitas sehingga siap kapan saja mengisi formasi setiap jenjang jabatan dari mulai Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan suksesor terpilih berdasarkan kompetensi dan kinerjanya.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan capaian IKU ini adalah adanya komitmen yang tinggi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memenuhi target indeks sistem merit.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu dengan telah dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga instansi yang memiliki kewenangan dalam mengukur Indeks Sistem Merit beralih ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, BKN masih belum selesai mempersiapkan infrastruktur terkait pengukuran indeks sistem merit.

Untuk itu, organisasi telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BKN guna memastikan langkah kedepan dalam pelaksanaan pengukuran IKU.



IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	72	82,97	115,24%
Tahun 2024	76	88,13	115,96%
Tahun 2025	76	88,8	116,84%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* IKU Indeks Profesionalitas ASN mencakup tersedianya dokumen penilaian kinerja menurut dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari keluaran di atas adalah “Indeks Profesionalitas ASN”. Pengukuran *outcome* ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan surat Sekretaris Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025, tanggal 24 Oktober 2025 disampaikan bahwa BKN sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Sekretariat Negara berupaya melakukan pengukuran secara mandiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan aspek penilaian profesionalitas ASN melalui Sistem Informasi Internal Kementerian Sekretariat Negara. Adapun hasil pengukuran mandiri diperoleh Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 sebesar 88,8. Nilai ini menunjukkan tingkat profesionalitas ASN Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Tinggi.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh:

- 1) komitmen tinggi dan kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) pencantuman target kinerja pelaksanaan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP per tahun dalam Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- 3) tersedianya sistem aplikasi yang memudahkan pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ini yaitu BKN sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk mengatasinya dilakukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut.

- 1) Melakukan pengukuran secara mandiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan aspek penilaian profesionalitas ASN melalui Sistem Informasi Internal Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BKN terkait penilaian IPASN sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan variabel/aspek penilaian.
- 3) Untuk meningkatkan skor IPASN Kementerian Sekretariat Negara ke depannya, perlu dilakukan diseminasi informasi berkelanjutan baik secara formal maupun informal dan selalu dilakukan *monitoring* capaian pengembangan kompetensi dengan target 20 JP.

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	P4 dari P5 (61)	P5 (88,57)	145,20%
Tahun 2024	P4 dari P5 (70)	P5 (88,73)	126,76%
Tahun 2025	P3 dari P5 (50)	P4 (85,32)	170,64%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) pada IKU ini adalah 14 dokumen laporan evaluasi kelembagaan yang telah disusun sesuai standar. Rincian dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Kementerian;
- 3) Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Presiden;
- 4) Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Wakil Presiden;
- 5) Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Militer Presiden;
- 6) Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dukungan Kabinet;
- 7) Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
- 8) Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- 9) Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputy Bidang Administrasi Aparatur;
- 10) Laporan Evaluasi Kelembagaan Badan Teknologi, Data, dan Informasi;
- 11) Laporan Evaluasi Kelembagaan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 12) Laporan Evaluasi Kelembagaan Pusat Analisis Kerja Sama;
- 13) Laporan Evaluasi Kelembagaan Pusat Pembinaan Penerjemah; dan
- 14) Laporan Evaluasi Kelembagaan Inspektorat.



b) Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian *outcome* pada IKU ini adalah Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara (*organization wide level*). Hasil evaluasi kelembagaan lingkungan Kementerian Sekretariat Negara terinci sebagai berikut.

TABEL 28
HASIL PENILAIAN EVALUASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NO.	SATUAN ORGANISASI	HASIL PENILAIAN
1.	Sekretariat Kementerian	Peringkat Komposit P-5 (83,82) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
2.	Sekretariat Presiden	Peringkat Komposit P-5 (88,18) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
3.	Sekretariat Wakil Presiden	Peringkat Komposit P-5 (85,95) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
4.	Sekretariat Militer Presiden	Peringkat Komposit P-5 (86,39) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
5.	Sekretariat Dukungan Kabinet	Peringkat Komposit P-4 (77,15) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
6.	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	Peringkat Komposit P-4 (73,98) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
7.	Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Peringkat Komposit P-5 (87,65) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
8.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Peringkat Komposit P-5 (84,78) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
9.	Badan Teknologi, Data, dan Informasi	Peringkat Komposit P-5 (87,90) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
10.	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN	Peringkat Komposit P-5 (92,45) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
11.	Pusat Pembinaan Analisis Kerja Sama	Peringkat Komposit P-5 (82,15) Tergolong Sangat Efektif dari struktur dan proses
12.	Pusat Pembinaan Penerjemah	Peringkat Komposit P-4 (76,08) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
13.	Inspektorat	Peringkat Komposit P-4 (76,55) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		Peringkat Komposit P-5 (85,32)



Hasil penilaian IKU.18 sebesar Peringkat Komposit P-5 dengan skor 85,32 dari target P-3 (50). Hasil ini artinya “Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi”.

c) **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) peran pimpinan yang responsif dan berkomitmen penuh dalam mendukung evaluasi kelembagaan;
- 2) telah dilakukan penyederhanaan instrumen penilaian;
- 3) tersedianya data dukung dalam penyelesaian penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan; dan
- 4) koordinasi yang baik dan efektif dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara maupun dengan pihak eksternal.

d) **Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Masih terdapat kendala dalam implementasi instrumen evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018.

Untuk mengatasinya Kementerian Sekretariat Negara telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menyesuaikan instrumen evaluasi kelembagaan agar adaptif dengan kondisi organisasi.

- 2) Masih terdapat proses pengisian dan pengolahan data survei yang dilakukan secara manual.

Telah dilakukan proses pengolahan data dengan menyusun formulasi rumus yang lebih memudahkan dan mempercepat proses pengolahan data, serta meminimalkan kesalahan saat memasukkan data. Adapun terkait dengan keamanan datanya, telah dilakukan koordinasi dengan Badan Teknologi, Data, dan Informasi.

- 3) Masih rendahnya partisipatif responden dalam pengisian survei.

Melakukan koordinasi secara intensif dengan para pihak terkait baik metode survei maupun pemberian pemahaman pada pegawai melalui kegiatan sosialisasi.



IKU.19 Indeks Maturitas SPBE

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,3 Skala 5 (Baik)	3,38 Skala 5 (Baik)	102,4%
Tahun 2024	3,4 Skala 5 (Baik)	3,95 Skala 5 (Sangat Baik)	123,44%
Tahun 2025	3,50 Skala 5 (Sangat Baik)	3,95 Skala 5 (Sangat Baik)	112,86%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran kinerja (*output*) tahun 2025 berupa dokumen dan layanan terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup:

- 1) Dokumen Arsitektur SPBE;
- 2) Dokumen Peta Rencana SPBE;
- 3) Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE;
- 4) Dokumen Proses Bisnis;
- 5) Aplikasi SPBE;
- 6) Layanan Pusat Data Instansi;
- 7) Layanan Jaringan Intra Instansi;
- 8) Sistem Penghubung Layanan Instansi;
- 9) Dokumen Pembentukan dan Laporan Tim Koordinasi SPBE Instansi; dan
- 10) Dokumen Laporan Kolaborasi Penerapan SPBE.

Di tahun 2025, Indeks Maturitas SPBE Kementerian Sekretariat Negara memperoleh nilai sebesar 3,95 Skala 5 dari target sebesar 3,50 Skala 5, dengan predikat “Sangat Baik”. Selain itu, keluaran lain yang dihasilkan adalah Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor 100 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Manajemen dan Audit TIK SPBE Kementerian Sekretariat Negara menggantikan Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Manajemen dan Audit TIK SPBE Kementerian Sekretariat Negara. Adapun penyesuaian arsitektur SPBE telah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) versi 3 sehingga berdampak pada peningkatan nilai kematangan penerapan arsitektur SPBE dari semula 2 menjadi 4.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari keluaran kinerja di atas adalah tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.



Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, disampaikan bahwa mekanisme penilaian Evaluasi RB Tahun 2025 menggunakan nilai tahun sebelumnya apabila kementerian/lembaga meso tidak melaksanakan evaluasi di tahun 2025. Kementerian Sekretariat Negara masih menggunakan hasil penilaian Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hasil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dimana seluruh domain dan aspek dalam penilaian SPBE telah dipenuhi. Indeks SPBE Kementerian Sekretariat Negara memperoleh nilai sebesar 3,95 dengan predikat “Sangat Baik” dari target predikat “Baik”.

TABEL 29
RINCIAN HASIL PENILAIAN INDEKS MATURITAS SPBE

No.	Aspek Penilaian	Nilai		
		2023	2024	2025
1.	Domain kebijakan SPBE	3,10	4,60	4,60
2.	Domain tata kelola SPBE	3,40	4,10	4,10
3.	Domain manajemen SPBE	2,09	2,55	2,55
4.	Domain layanan SPBE	3,92	4,19	4,19
	INDEKS MATURITAS SPBE	3,38 (*)	3,95	3,95

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) komitmen pimpinan dalam melaksanakan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan penguatan tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari semula unit kerja (eselon II) menjadi satuan organisasi (eselon I) yang mengedepankan transformasi digital;
- 2) komitmen seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Teknologi, Data, dan Informasi untuk memberikan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman;
- 3) terwujudnya kolaborasi internal dan eksternal antara lain dalam implementasi SPBE, pengembangan layanan TIK terintegrasi, dan transformasi digital serta pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia;
- 4) terselenggaranya pembangunan aplikasi, infrastruktur, dan keamanan digital yang berkelanjutan; dan
- 5) penguatan sistem informasi, infrastruktur, dan data analitik melalui pembangunan Dashboard *Situation Room*.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Penyesuaian kebijakan internal tata kelola SPBE sebagai implikasi dari perubahan struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara.
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan review dan penyusunan kebijakan internal, tata kelola, serta arsitektur dan peta rencana SPBE.
- 2) Belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antar unit kerja internal, sehingga masih terjadi duplikasi data dan proses bisnis.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan penyelarasan proses bisnis dan inventarisasi data.
- 3) Peningkatan risiko akibat pesatnya perkembangan teknologi, belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan tata kelola, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan informasi, ketidaksesuaian standar, dan kompleksitas pengelolaan sistem.
Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kesadaran keamanan informasi, aktif melakukan pembaruan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SPBE melalui pelatihan, sertifikasi, serta optimalisasi kolaborasi dengan mitra.

7. Sasaran Strategis “Pengendalian internal yang efektif”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), “Tingkat Maturitas SPIP”.

IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	3,27 (Level 3)	3,97 (Level 3)	121,41%
Tahun 2024	3,32 (Level 3)	3,98 (Level 3)	119,88%
Tahun 2025	3,32 (Level 3)	3,78 (Level 3)	113,86%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja output IKU ini adalah Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025. Pelaksanaan penyusunan laporan dimaksud dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 97 Tahun 2025 tentang Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025.



Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP memuat informasi penilaian sebagai berikut.

- 1) Penetapan Tujuan, meliputi:
 - Kualitas Sasaran Strategis
 - Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
- 2) Struktur dan Proses, meliputi:
 - Lingkungan pengendalian
 - Penilaian risiko
 - Kegiatan pengendalian
 - Informasi dan komunikasi
 - Pemantauan
- 3) Pencapaian Tujuan, meliputi:
 - Efektifitas dan efisiensi
 - Keandalan Laporan Keuangan
 - Pengamanan atas Aset
 - Ketaatan pada Peraturan

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja *outcome* berupa hasil penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara. Rincian hasil penilaian komponen, unsur, dan subunsur penyelenggaraan SPIP tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut.

TABEL 30
HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP
DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KOMPONEN, UNSUR, DAN SUBUNSUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI 2023	NILAI 2024	NILAI 2025
1. PENETAPAN TUJUAN					
Kualitas Sasaran Strategis	50%	4,000	2,500	2,500	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500	2,500	2,500
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100%		5,000	5,000	4,500
BOBOT PERENCANAAN	40%		2,000	2,000	1,800
2. STRUKTUR DAN PROSES					
Lingkungan Pengendalian	30%	3,307	0,829	0,949	0,992
Penilaian Risiko	20%	2,865	0,379	0,278	0,281
Kegiatan Pengendalian	25%	3,456	0,744	0,777	0,864
Informasi dan Komunikasi	10%	2,810	0,271	0,266	0,281
Pemantauan	15%	2,000	0,363	0,338	0,300
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100%		2,586	2,608	3,010
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30%		0,776	0,782	0,903



KOMPONEN, UNSUR, DAN SUBUNSUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI 2023	NILAI 2024	NILAI 2025
3. PENCAPAIAN TUJUAN					
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi					
Capaian <i>Outcome</i>	20%	5,000	1,000	1,000	1,000
Capaian <i>Output</i>	10%	5,000	0,500	0,500	0,500
Keandalan Pelaporan Keuangan					
Opini LK	25%	3,000	0,750	0,750	0,750
Pengamanan atas Aset Negara					
Catatan Pengamanan Aset	25%	3,000	0,750	0,750	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan					
Temuan Ketaatan - BPK	20%	3,000	1,000	1,000	0,600
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100%		4,000	4,000	3,600
BOBOT HASIL	30%		1,200	1,200	1,080
TOTAL			3,976	3,982	3,783

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Kementerian Sekretariat Negara sebesar 3.783 (Level 3) memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi”, yaitu “Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif”.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Tersedianya sumber daya yang memadai;
- 2) Komitmen pimpinan dan pejabat/pegawai dalam upaya peningkatan maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara;
- 3) Koordinasi lintas unit kerja yang optimal sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 97 Tahun 2025 tentang Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025, sehingga koordinasi pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara lebih efektif.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Penetapan target kinerja/perjanjian kerja belum mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Upaya mengatasinya dengan merekomendasikan agar penyusunan target dan perjanjian kinerja dapat mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

- 2) Kompetensi, kesadaran (*awareness*) penerapan manajemen risiko, dan implementasi rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko masih perlu ditingkatkan.

Upaya mengatasinya dengan meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan manajemen risiko baik secara internal maupun in house training pada lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal.

- 3) Komunikasi, pemantauan implementasi, dan reviu proses manajemen risiko belum berjalan dengan efektif.

Upaya mengatasinya dengan mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen risiko pada seluruh pegawai pada seluruh pegawai, melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko, melakukan reviu proses manajemen risiko dan reviu terhadap Rencana Tindak Pengendalian/Rencana Penanganan Risiko.

8. Sasaran Strategis “Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara

IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	76,12 (BB)	82,04 (A)	107,78%
Tahun 2024	76,16 (BB)	81,25 (A)	106,68%
Tahun 2025	76,16 (BB)	82,02 (A)	107,69%



a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian keluaran (*output*) IKU “Nilai Akuntabilitas Kinerja” berupa dokumen pendukung penilaian kinerja yang mencakup aspek:

- 1) Perencanaan kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja;
- 3) Pelaporan kinerja;
- 4) Evaluasi kinerja; dan
- 5) Capaian kinerja.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Penilaian kinerja *outcome* “Nilai Akuntabilitas Kinerja” dilakukan oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian tahun 2025 dimuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/498/AA.05/2025, tanggal 30 Desember 2025, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, dengan nilai sebesar 82,02 (A). Rincian hasil penilaian sebagaimana pada tabel berikut.

TABEL 31
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI 2023	NILAI 2024	NILAI 2025
Perencanaan Kinerja	25,03	25,09	25,27
Pengukuran Kinerja	24,17	23,73	24
Pelaporan Kinerja	12,62	12,59	12,59
Evaluasi Kinerja	-	-	-
Capaian Kinerja	-	-	-
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,22	19,85	20,16
Nilai Hasil Evaluasi	82,04	81,25	82,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	A	A	A

Hasil penilaian di atas memiliki interpretasi “Memuaskan”, yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.
- 2) Komitmen aparatur dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yaitu rendahnya partisipasi satuan organisasi/unit kerja dalam pelaporan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Untuk mengatasinya dilakukan koordinasi yang intensif antara satuan organisasi/unit kerja dan peningkatan APIP selaku evaluator internal AKIP Kementerian Sekretariat Negara.

IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	WTP	WTP	100%
Tahun 2024	WTP	WTP	100%
Tahun 2025	WTP	WTP	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Kinerja keluaran (*output*) pada IKU ini sebanyak 3 (tiga) jenis Laporan Keuangan, antara lain:

- 1) Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
- 2) Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Sekretariat Negara.
- 3) Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 Nomor 10.a/LHP/XV/05/2025, tanggal 19 Mei 2025, disebutkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, capaian kinerja *outcome* IKU “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara” berupa Opini WTP telah tercapai 100%.



Pencapaian kinerja berupa opini WTP atas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan memberikan gambaran adanya akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk terus memperbaiki mutu layanan dan mencapai target kinerja.
- 2) Optimalisasi penggunaan teknologi untuk mempermudah proses dan akses terhadap pelayanan antara lain dengan penggunaan *Cash Management System* dalam proses pembayaran secara *cashless*.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Masih ditemukan rendahnya pemahaman terkait kapitalisasi nilai aset (*intracomtable* dan *extracomtable*), kesesuaian penggunaan akun belanja modal dengan kodifikasi barang, dan transaksi resiprokal sehingga menjadi kurang tertibnya dalam penatausahaan dokumen sumber yang berdampak pada adanya selisih tingkat LKPP.

Solusi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan diseminasi informasi yang baik kepada para pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dibidang keuangan sehingga tercapai keseragaman pemahaman dalam pengelolaan keuangan.

- 2) Adanya penyesuaian organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara sehingga membutuhkan waktu dalam konsolidasi laporan keuangan.

Solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi antar unit terkait dan konsultasi secara aktif dengan instansi Pembina dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Informasi Sistem Teknologi Perbendaharaan termasuk melalui kanal <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



9. Sasaran Strategis “Pelaksanaan tugas khusus yang optimal”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), “Persentase capaian kinerja tugas khusus”.

IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	100%	100%	100%
Tahun 2024	100%	100%	100%
Tahun 2025	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja IKU ini antara lain:

- 1) Layanan pengoordinasian dukungan administrasi bagi:
 - Dewan Pertimbangan Presiden
 - Kantor Staf Presiden
 - Pasukan Pengamanan Presiden
 - Dewan Ekonomi Nasional
 - Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dalam hal ini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah
 - Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
 - Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno
 - Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
- 2) Layanan pemberian bantuan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian *outcome* IKU “Persentase capaian kinerja tugas khusus” sebesar 100%, yang ditunjukkan dengan terselenggaranya seluruh tugas khusus yang ditetapkan/ditugaskan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan *pencapaian* IKU ini dipengaruhi oleh:

- 1) Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.
- 2) Komitmen aparatur dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.



d) **Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah keterlambatan penyampaian data kinerja oleh sebagian unit organisasi. Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi pengumpulan data kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

10. **Sasaran Strategis “Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas”**

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.24 Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan.

IKU.25 Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti.

IKU.26 Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja sasaran strategis tersebut terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dukungan Kabinet (sebelumnya Sekretariat Kabinet) yang bergabung dengan Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2025, sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Dengan demikian, kurun waktu capaian kinerja pada Sekretariat Dukungan Kabinet pada Kementerian Sekretariat Negara yang dapat dihimpun pada penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025 hanya merupakan capaian kinerja pada tahun 2025.

IKU.24 Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	93%	98,59%	106,01%
Tahun 2024	96%	100%-	104,17%-
Tahun 2025	90%	99,05%	110,05%



a) **Capaian Kinerja *Output***

Keluaran (*output*) kinerja ini yaitu berupa rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan Sekretaris Dukungan Kabinet kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program yang disampaikan dapat berupa:

- 1) Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;
- 2) Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden; Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden;
- 3) Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
- 4) Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan; Rekomendasi berdasarkan kajian akademik; dan Rekomendasi dalam penyiapan materi sidang kabinet.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Dukungan Kabinet telah menyampaikan sebanyak 1.574 rekomendasi kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga, dengan 1.559 rekomendasi telah dimanfaatkan. Dengan demikian, dari target sebesar 90%, realisasi atas output dimaksud adalah 99%, atau diperoleh capaian kinerja *output* sebesar 110%.

b) **Capaian Kinerja *Outcome***

Outcome dari keluaran kinerja ini yaitu berupa rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang telah dimanfaatkan oleh Kementerian atau Lembaga. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program yang dimanfaatkan berarti rekomendasi tersebut diterima, tidak ada penolakan, dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga. Adapun dari 1.574 rekomendasi yang disampaikan, sebesar 1.559 rekomendasi telah dimanfaatkan (99% telah dimanfaatkan). Oleh sebab itu dari target yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 110% atau dengan kategori "**memuaskan**".

TABEL 32
KELUARAN REKOMENDASI ATAS RENCANA KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMERINTAH YANG TELAH DIMANFAATKAN OLEH
KEMENTERIAN/LEMBAGA

No.	Satuan Organisasi	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
1.	Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM	627	627	100%	90%	111%
2.	Perekonomian	396	396	100%	90%	111%



No.	Satuan Organisasi	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
3.	Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	305	290	95%	90%	106%
4.	Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	246	246	100%	90%	111%
Total		1.574	1.559	99%	90%	110%

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Posisi strategis Sekretariat Dukungan Kabinet dalam mengawal program pemerintah serta memantau tindak lanjut dari program/arahan Presiden.
- 2) Peran pimpinan dalam menggerakkan organisasi untuk dapat mencapai target kinerja.
- 3) Ketersediaan data serta platform data yang valid dan up to date.
- 4) Kapabilitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dinamika pembagian tugas yang belum merata sebagai dampak adanya perpindahan Jabatan Struktural ke jabatan Fungsional Tertentu.
Solusi yang dilakukan yakni melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial yang terarah, *coaching*, serta optimalisasi pembagian tugas sesuai kompetensi.
- 2) Sistem kerja yang belum optimal baik dari aspek mekanisme koordinasi internal dan lintas unit maupun aspek alur kerja serta pembagian peran yang tumpang tindih sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas.
Solusi yang dilakukan yakni penyempurnaan tata kelola dan koordinasi kerja dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, alur proses bisnis, serta memperkuat forum koordinasi internal dan lintas unit.
- 3) Sistem dan proses kerja belum terdigitalisasi secara optimal sehingga kurang efektif, efisien, rawan kesalahan.
Solusi yang dilakukan yakni melakukan optimalisasi digitalisasi proses kerja; dan penerapan sistem informasi terintegrasi untuk administrasi, pelaporan, dan monitoring guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.



IKU.25 Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	96%	100%	104,17%
Tahun 2024	100%	100%	100%
Tahun 2025	90%	97,69%	108,54%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja ini yaitu berupa rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Pada tahun 2025, Sekretariat Dukungan Kabinet telah menyampaikan sejumlah 216 rekomendasi kebijakan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga. Dari target sebesar 90%, realisasi atas *output* dimaksud adalah 97,69%, atau diperoleh capaian kinerja *output* sebesar 108,54%.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari keluaran kinerja ini yaitu adanya rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga. Sebuah rekomendasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti apabila rekomendasi kebijakan tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Adapun dari total 216 rekomendasi kebijakan yang disampaikan, terdapat 211 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dan digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

TABEL 33
KELUARAN REKOMENDASI ATAS ALTERNATIF PENYELESAIAN
MASALAH ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMERINTAH YANG MENGALAMI HAMBATAN YANG
DITINDAKLANJUTI

NO.	Satuan Organisasi	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
1.	Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM	28	28	100%	90%	111,11%
2.	Perekonomian	73	73	100%	90%	111,11%



NO.	Satuan Organisasi	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
3.	Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	58	53	95%	90%	101,53%
4.	Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	57	57	100%	90%	111,11%
Total		216	211	97,68%	90%	108,53%

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Posisi strategis Sekretariat Dukungan Kabinet dalam mengawal program pemerintah serta memantau tindak lanjut dari program/arahan Presiden.
- 2) Peran pimpinan dalam menggerakkan organisasi untuk dapat mencapai target kinerja.
- 3) Ketersediaan data serta platform data yang valid dan up to date.
- 4) Kapabilitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dinamika pembagian tugas yang belum merata sebagai dampak adanya perpindahan Jabatan Struktural ke jabatan Fungsional Tertentu.
Solusi yang dilakukan yakni melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial yang terarah, *coaching*, serta optimalisasi pembagian tugas sesuai kompetensi.
- 2) Sistem kerja yang belum optimal baik dari aspek mekanisme koordinasi internal dan lintas unit maupun aspek alur kerja serta pembagian peran yang tumpang tindih sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas.
Solusi yang dilakukan yakni penyempurnaan tata kelola dan koordinasi kerja dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, alur proses bisnis, serta memperkuat forum koordinasi internal dan lintas unit.
- 3) Sistem dan proses kerja belum terdigitalisasi secara optimal sehingga kurang efektif, efisien, rawan kesalahan.
Solusi yang dilakukan yakni melakukan optimalisasi digitalisasi proses kerja; dan penerapan sistem informasi terintegrasi untuk administrasi, pelaporan, dan monitoring guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.



IKU.26 Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	96%	100%	104,17%
Tahun 2024	100%	100%	100%
Tahun 2025	90%	100%	111,11%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja ini yaitu berupa rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan Sekretaris Dukungan Kabinet kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Dukungan Kabinet yaitu dengan melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi tindak lanjut perbaikannya kepada Presiden.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Dukungan Kabinet telah menyampaikan sebanyak 247 rekomendasi kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga. Dari target sebesar 90%, realisasi atas output dimaksud adalah 100%, atau diperoleh capaian kinerja *output* sebesar 111,11%.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari keluaran kinerja ini yaitu berupa rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang telah ditindaklanjuti yaitu digunakannya rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud sebagai masukan (*feedback*) atau sebagai dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Adapun dari 247 rekomendasi yang disampaikan, sejumlah 247 rekomendasi telah ditindaklanjuti (100% telah ditindaklanjuti). Oleh sebab itu dari target yang ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 111,11%.



TABEL 34
KELUARAN REKOMENDASI ATAS HASIL PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	Satuan Organisasi	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
1.	Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM	60	60	100%	90%	111%
2.	Perekonomian	105	105	100%	90%	111%
3.	Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	32	32	100%	90%	111%
4.	Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	50	50	100%	90%	111%
Total		247	247	100%	90%	111%

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Posisi strategis Sekretariat Dukungan Kabinet dalam mengawal program pemerintah serta memantau tindak lanjut dari program/arahan Presiden.
- 2) Peran pimpinan dalam menggerakkan organisasi untuk dapat mencapai target kinerja.
- 3) Ketersediaan data serta platform data yang valid dan up to date.
- 4) Kapabilitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

- 1) Dinamika pembagian tugas yang belum merata sebagai dampak adanya perpindahan Jabatan Struktural ke jabatan Fungsional Tertentu.
Solusi yang dilakukan yakni melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial yang terarah, coaching, serta optimalisasi pembagian tugas sesuai kompetensi.



- 2) Sistem kerja yang belum optimal baik dari aspek mekanisme koordinasi internal dan lintas unit maupun aspek alur kerja serta pembagian peran yang tumpang tindih sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas.
Solusi yang dilakukan yakni penyempurnaan tata kelola dan koordinasi kerja dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, alur proses bisnis, serta memperkuat forum koordinasi internal dan lintas unit.
- 3) Sistem dan proses kerja belum terdigitalisasi secara optimal sehingga kurang efektif, efisien, rawan kesalahan.
Solusi yang dilakukan yakni melakukan optimalisasi digitalisasi proses kerja; dan penerapan sistem informasi terintegrasi untuk administrasi, pelaporan, dan monitoring guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

11. Sasaran Strategis “Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.27 Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

IKU.28 Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan

IKU.27 Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	93%	89,14%	95,85%
Tahun 2024	94%	91,41%	97,24%
Tahun 2025	87,6%	95,05%	108,50%

a) Capaian Kinerja Output

Pada periode Januari s.d. Desember 2025, Sekretariat Dukungan Kabinet dalam hal ini Deputi Bidang Persidangan Kabinet telah mengelola penyelenggaraan sidang kabinet paripurna, rapat terbatas dan pertemuan lainnya yang selanjutnya disebut persidangan kabinet sebanyak 111 kali persidangan kabinet dengan rincian 8 kali Sidang Kabinet Paripurna, 23 kali Rapat Terbatas, serta 80 kali Rapat Internal dan Pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Presiden.



Selanjutnya Deputi Bidang Persidangan Kabinet juga menghasilkan beberapa output lainnya pada antara lain:

- 1) 19 pelaporan permohonan risalah;
- 2) 194 pelaporan pokok-pokok pidato Presiden periode 2025;
- 3) 108 pelaporan janji Presiden periode 2025; dan
- 4) Cetakan buku yang terdiri dari 56 buku himpunan risalah, 2 buku Himpunan Periode Satu Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih 20 Oktober 2024 s.d. 20 Oktober 2025, dan 1 buku Capaian Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

b) *Capaian Kinerja Outcome*

Pada tahun 2025, capaian kinerja Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden diperoleh dari nilai rata-rata 2 jenis survei yaitu Survei Kelancaran Penyelenggaraan Sidang Kabinet yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Penyelenggaraan Persidangan dan Survei Kepuasan Risalah Persidangan Kabinet yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pelaporan Persidangan. Kedua jenis survei dimaksud dianggap relevan dan sesuai dengan proses bisnis yang dilaksanakan.

Survei kelancaran terhadap pelaksanaan penyelenggaraan persidangan kabinet dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 Desember 2025 dengan responden sebanyak 7 orang yaitu Sekretaris Dukungan Kabinet, 5 Deputi di lingkungan Sekretariat Dukungan Kabinet, dan Kepala Sekretariat Presiden sebagai pemangku kepentingan dari layanan Penyelenggaraan Sidang Kabinet.

Survei kepuasan terhadap risalah persidangan kabinet dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Januari 2026 dengan responden sebanyak 5 orang yaitu Sekretaris Dukungan Kabinet dan 4 Deputi Substansi di lingkungan Sekretariat Dukungan Kabinet sebagai penerima manfaat dari layanan risalah. Survei kepuasan terhadap risalah persidangan kabinet menggunakan kuesioner yang sama dengan survei kepuasan terhadap layanan monitoring risalah. Tidak ada masukan dan saran dari responden untuk kedua survei tersebut.

Adapun hasil survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebesar 95,05% yang diperoleh dari rata-rata hasil Survei Kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Persidangan Kabinet sebesar 95,71% dan Survei Kepuasan Risalah Persidangan Kabinet sebesar 94,38%. Hasil survey sebesar 95,05% tersebut apabila dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87,60%, memperoleh capaian pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tahun 2025 adalah sebesar 108,5%.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Komunikasi yang intensif dengan stakeholder.
- 2) Kualitas SDM layanan pengelolaan persidangan kabinet.
- 3) Sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu adanya kendala penyampaian informasi penyelenggaraan persidangan kabinet yang dilakukan secara mendadak, sehingga solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait.

IKU.28 Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	100%	100%	100%
Tahun 2024	100%	100%	100%
Tahun 2025	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada Tahun 2025, dari target sejumlah 160 naskah kepresidenan dan kenegaraan beserta 500 dokumen terjemahan, seluruh naskah dan dokumen terjemahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara, sehingga capaian realisasi tahun 2025 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2025 telah dihasilkan *output* berupa penyiapan 283 naskah kepresidenan dan kenegaraan yang terdiri dari:

- 1) Naskah Surat Korespondensi Diplomatik Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan/atau Kepala Organisasi Internasional yang diajukan sebanyak 128 naskah;
- 2) Naskah Penempatan/Penarikan Perwakilan Diplomatik/Konsuler RI untuk Negara Sahabat (Letter of Credence dan Letter of Recall) serta Surat Tauliah (Letter of Commission) sebanyak 136 naskah;
- 3) Naskah Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI terkait Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Negara Sahabat untuk Republik Indonesia yang diajukan sebanyak 15 naskah; dan
- 4) Naskah Surat Pengakuan (Exequatur) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan Negara Sahabat di Republik Indonesia yang diajukan sebanyak 4 naskah.



Selain penyiapan naskah kepresidenan dan kenegaraan, dilakukan juga kegiatan penerjemahan tertulis dan lisan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bagian dari *output* Naskah Kepresidenan dan Kenegaraan. Layanan penerjemahan tersebut mendukung pelaksanaan komunikasi diplomatik Indonesia secara profesional dan efektif, baik dalam kegiatan kenegaraan, pertemuan bilateral dan multilateral, maupun forum internasional. Dukungan penerjemahan lisan juga diberikan kepada kementerian/lembaga lain dalam penyelenggaraan pertemuan resmi dengan mitra asing. Sementara itu, penerjemahan tertulis meliputi dokumen resmi dan publikasi Pemerintah, antara lain pidato Presiden, artikel/berita pada situs web resmi Sekretariat Dukungan Kabinet, transkripsi pidato, serta produk hukum dan dokumen resmi lainnya.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Dengan mempertimbangkan fungsi strategis naskah kepresidenan dan kenegaraan sebagai instrumen resmi penyelenggaraan pemerintahan dan diplomasi negara, maka pada tahun 2025 ditetapkan target Indikator Sasaran Strategis Persentase Naskah Kepresidenan dan Kenegaraan yang Dimanfaatkan sebesar 100%.

Pada Tahun 2025, realisasi output Naskah Kepresidenan dan Kenegaraan mencapai 100% dari target yang ditetapkan, dengan capaian sebanyak 160 naskah kepresidenan dan kenegaraan serta 500 dokumen terjemahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kepresidenan dan Kenegaraan, sehingga capaian kinerja berada pada predikat “sangat baik”.

TABEL 35
KELUARAN NASKAH KEPRESIDENAN YANG DIMANFAATKAN

No.	Jenis Dokumen	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
1.	Naskah Kepresidenan dan Kenegaraan	160	160	100%	100%	100%
2.	Dokumen Terjemahan	500	500	100%	100%	100%
	Total	660	660	100%	100%	100%

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Komunikasi yang intensif dengan stakeholder.
- 2) Kuantitas SDM yang memadai.
- 3) Sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi beserta solusi dalam mencapai target IKU ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Keterbatasan waktu dalam penyelesaian dukungan naskah kepresidenan yang merupakan direktif Presiden.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas terjemahan dokumen resmi dan publikasi pemerintah.
- 2) Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam hal penerjemahan lisan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengusulkan keikutsertaan para pejabat/pegawai pada program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas penerjemah dan terjemahan.

12. Sasaran Strategis “Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.29 Persentase tingkat kepuasan dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir

IKU.29 Persentase tingkat kepuasan dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir

PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tahun 2023	96%	100%	104,17%
Tahun 2024	98%	98,20%	100,20%
Tahun 2025	90%	100%	111,11%



a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2025 telah diajukan 182 rancangan Keputusan Presiden yang terdiri dari:

- 1) 175 rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan jabatan lainnya;
- 2) 2 rancangan Keputusan Presiden tentang pembentukan Panitia Seleksi dan/atau Tim Penilai Kinerja;
- 3) 4 rancangan Keputusan Presiden tentang penunjukan Pelaksana Tugas; dan
- 4) 1 rancangan Keputusan Presiden tentang perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Berdasarkan rancangan tersebut, telah ditetapkan 182 Keputusan Presiden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja penyelenggaraan TPA Tahun 2025 sebesar 100%, yang mencerminkan optimalnya kualitas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat Dukungan Kabinet dalam mendukung proses pengambilan keputusan Presiden RI. Adapun target kinerja Sekretariat Dukungan Kabinet yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar 90%, capaian TPA tahun 2025 adalah sebesar 111,11%, dengan kategori pencapaian kinerja "memuaskan".

TABEL 36
KELUARAN DOKUMEN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA,
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, DAN JABATAN LAINNYA
YANG DIMANFAATKAN

NO.	JENIS DOKUMEN	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
1.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Lainnya	175	175	100%	90%	111,11%
2.	Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan/atau Tim Penilai Kinerja	2	2	100%	90%	111,11%



NO.	JENIS DOKUMEN	Output	Outcome	Realisasi	Target	Capaian
3	Keputusan Presiden tentang Penunjukan Pelaksana Tugas	4	4	100%	90%	111,11%
4	Keputusan Presiden tentang Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1	1	100%	90%	111,11%
Total		182	182	100%	90%	111,11%

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- 1) Penggunaan Sistem Informasi TPA (SIMTPA) dalam penyiapan Rancangan Keputusan Presiden yang memberikan kemudahan dalam keterpaduan data.
- 2) Kolaborasi yang efektif dengan pihak eksternal khususnya dalam penyediaan data kepegawaian yang telah terstandarisasi dan tervalidasi secara nasional.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ini yaitu ketidaklengkapan dan kurang validnya data atau informasi yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.

Solusi yang dilakukan yakni dengan koordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait serta dilakukan koreksi data pada basis data internal melalui SIMTPA.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode kinerja tahun 2023-2025. Perbandingan capaian kinerja pada masing-masing periode tahun kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023-2025

Capaian indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut:



TABEL 37
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025

TABEL 38
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023-2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,95 Skala 4	3,10 Skala 4	105,08%	3,03 Skala 4	3,15 Skala 4	103,80%	3,11 Skala 4	3,13 Skala 4	100,64%
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,42 Skala 4	3,7 Skala 4	108,09%	3,58 Skala 4	3,78 Skala 4	105,68%	3,60 Skala 4	3,78 Skala 4	105%
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	38%	51,56%	107,42%	50%	52,12%	104,24%	36%	48,99%	136,08%



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,3 Skala 5	4,43 Skala 5	134,24%	3,40 Skala 5	4,68 Skala 5	137,65%	4 Skala 5	5,54 Skala 5	138,50%
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,3 Skala 5	3,78 Skala 5	114,55%	3,40 Skala 5	4,34 Skala 5	127,65%	4 Skala 5	4,43 Skala 5	110,75%
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,62 Skala 5	4 Skala 5	100,50%	3,64 Skala 5	4,33 Skala 5	118,96%	4 Skala 5	4,40 Skala 5	110,18%
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	3,00 Skala 4	3,58 Skala 4	119,47%	3,09 Skala 4	3,52 Skala 4	114,04%	3,11 Skala 4	3,61 Skala 4	116,08%
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	3,00 Skala 4	3,7 Skala 4	123,33%	3,04 Skala 4	3,73 Skala 4	122,70%	3,04 Skala 4	3,74 Skala 4	123,03%
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,83 Skala 6	5,34 Skala 6	110,57%	4,88 Skala 6	5,41 Skala 6	110,87%	4,9 Skala 6	5,44 Skala 6	111,02%
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73 Skala 6	5,27 Skala 6	114,43%	4,78 Skala 6	5,31 Skala 6	110,99%	4,8 Skala 6	5,21 Skala 6	108,54%
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,63 Skala 6	5,37 Skala 6	116%	4,63 Skala 6	5,20 Skala 6	112,22%	4,7 Skala 6	5,24 Skala 6	111,49%



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,3 Skala 6	5,33 Skala 6	123,95%	4,32 Skala 6	5,60 Skala 6	129,63%	4,32 Skala 6	5,38 Skala 6	124,54%
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	82,06	87,7	106,87%	82,1	81,61	99,40%	81,10	83,36	102,79%
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	17. Indeks Profesionalitas ASN	72	82,97	115,24%	76	76	100%	76	88,8	118,40%
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5 (61)	88,57	145,2%	P4 (70)	P5 (88,73)	126,76%	P3 dari P5 (50)	P4 dari P5 (77,15)	154,30%
	19. Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	123,44%	3,50 Skala 5	3,95 Skala 5	112,86%
7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	3,27 (Level 3)	3,97 (Level 3)	121,41%	3,32	3,98	119,88%	3,32 (Level 3)	3,32 (Level 3)	100%
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,12 (BB)	82,04	107,78%	76,16	81,25	106,68%	76,16 (BB)	81,25 (A)	106,68%
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	24. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%
	25. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	26. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%
11. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	27. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	-	-	-	-	-	-	87,6%	100%	100%
	28. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
13. Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas	29. Persentase tingkat kepuasan dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%



E. Akuntabilitas Keuangan

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Pelaksanaan kinerja tahun 2023-2025 masih mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Rincian alokasi dan realisasi anggaran menurut program pada tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut.

TABEL 39
RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM
TAHUN 2023-2025

Program	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	3.146.815.467	3.070.622.420	97,58	3.430.918.08.	3.305.424.037	96,34	3.282.545.506	2.996.053.614	91,27
Program Dukungan Manajemen	1.467.876.829	1.419.824.644	96,73	1.843.651.967	1.762.892.737	95,62	3.393.606.281	3.143.003.898	92,61
JUMLAH	4.614.692.296	4.490.447.064	97,31	5.274.570.053	5.068.316.775	96,08	6.676.151.787	6.139.057.513	91,96

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Pelaksanaan kinerja tahun 2025 masih mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Perbandingan alokasi dan realisasi anggaran menurut sasaran strategis antara tahun 2024 dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 40
PERBANDINGAN RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1.379.706.000	1.117.142.226	80,97	501.425.000	444.924.415	88,73
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	21.256.764.000	21.133.633.513	99,42	16.331.722.000	7.859.806.393	48,13
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	11.382.736.000	10.521.951.573	92,44	3.314.527.000	3.049.137.572	92,44



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	28.975.470.000	27.812.949.948	95,99	31.718.159.000	31.459.495.206	99,18
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	2.622.659.882.000	2.511.756.777.161	95,77	2.970.355.777.000	2.756.538.696.020	92,80
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	1.482.566.037.000	1.422.461.653.421	95,95	778.369.084.000	677.884.973.986	87,09
7. Pengendalian internal yang efektif	1.605.633.000	1.324.569.521	82,50	144.900.000	144.104.883	99,45
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	4.487.590.000	3.708.150.370	82,63	1.491.074.450.000	1.479.628.792.842	99,23
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	1.100.256.235.000	1.068.479.947.688	97,11	1.379.586.428.000	1.177.390.130.550	85,34
10. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas				2.360.142.000	2.337.646.599	99,05
11. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas				2.134.736.000	2.079.617.710	97,42
12. Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya kepada Tim Penilai Akhir yang berkualitas				260.437.000	240.187.095	92,22
JUMLAH	5.274.570.053.000	5.068.316.775.421	96,09	6.676.151.787.000	6.139.057.513.271	91,96

Penyerapan anggaran tahun 2025 sebesar 91,96% dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. implementasi kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. efisiensi anggaran yang bersumber dari negosiasi kontrak pengadaan barang/jasa;
3. meningkatnya implementasi transformasi digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
4. komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.



F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2025 sebesar 91,96% yaitu dari alokasi anggaran akhir sebesar Rp6.676.151.787.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp6.139.057.513.271,00. Dengan pencapaian IKU sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 91,96%, maka terdapat efisiensi keuangan.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui aplikasi:

- 1) Dashboard *Situation Room* Presiden;
- 2) Portal Satu Data Indonesia Kemensetneg;
- 3) Portal Lapor Mas Wapres (LMW);
- 4) Artificial Intelligence Sekretariat Negara (AISA);
- 5) Penyiapan Undangan Istana (Pandang Istana);
- 6) Penyiapan Administrasi Undangan (Pandu);
- 7) Aplikasi *e-notulen*;
- 8) Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu-Evolution (PINTAR-EVO);
- 9) Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI);
- 10) Administrasi Pansel Elektronik (APEL)
- 11) Kendali Administrasi Pejabat Negara Elektronik (Kanjenk);
- 12) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara;
- 13) Aplikasi Pencarian Data Administrasi Hukum Umum (AHU);
- 14) Aplikasi Fasilitas Inpassing Pusat Pembinaan Analisis Kerja Sama (Inpassing AKS);
- 15) Aplikasi Pengelolaan Pejabat Fungsional Penerjemah (e-JFP);
- 16) Elektronik Analisis Jabatan (e-Anjab);
- 17) Elektronik Analisis Beban Kerja (e-ABK);
- 18) Aplikasi Elektronik Standar Operasional Prosedur (e-SOP);
- 19) *Big data analysis* bidang penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 20) Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (Singamas);
- 21) Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (Nadie);
- 22) Sistem Informasi Setneg Point;
- 23) Sistem Penyimpanan dan Berbagi Data (SCLOUD);
- 24) Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL);
- 25) Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP);
- 26) Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pembangunan (SIMPRO);
- 27) Sistem Informasi Tenaga Asing dan Fasilitas Kerja Sama Teknik (PINTAS);
- 28) Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Gratifikasi Kementerian (SIAPGRAK);
- 29) Sistem aplikasi pelayanan klinik (SiapKlik);



- 30) Sistem Informasi Manajemen Arsip (SIMARSIP);
- 31) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPA);
- 32) Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS);
- 33) Sistem Informasi Merit (SIMERIT); dan
- 34) Sistem Informasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (SIMGTK).

3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 3.005 orang dan pola kerja *flexible working arrangement*, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas untuk memudahkan konsep kerja yang terintegrasi dan terdigitalisasi, serta dengan adanya perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional memungkinkan adanya kolaborasi unit kerja lintas sektoral dan sistem kerja yang lebih *agile* guna mempercepat penyelesaian pekerjaan.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan revaluasi dan reformulasi pengukuran terhadap indikator kinerja agar hasilnya dapat menggambarkan dengan baik atas pencapaian kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Mengedepankan proses perencanaan kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan kinerja individu melalui sistem informasi yang terintegrasi.

2. Peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur Kementerian Sekretariat Negara dengan menargetkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelatihan per tahun.
- b. Melakukan monitoring capaian kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan kinerja individu berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja berbasis *Objective Key Results* (OKR).
- c. Melakukan pembahasan dan monitoring isian capaian kinerja secara berkala untuk memastikan konsistensi dan keandalan data capaian kinerja yang akan dilaporkan ke dalam aplikasi pemantauan kinerja dari Kementerian Keuangan (<https://smart.kemenkeu.go.id/>) dan Kementerian PPN/Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id/>).



H. Kinerja Lainnya

1. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



2. Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan Penghargaan Terbaik Ke-2 kategori Pengelolaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan





3. Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan penghargaan sebagai Instansi yang telah diverifikasi dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian pada Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 dengan capaian Level 4 - Terkelola pada Indeks Penyelenggaraan Persandian dan Level 5 - Inovatif pada Indeks Kematangan Keamanan Siber.



4. Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan penghargaan Peringkat II Kategori *Website* Kelompok Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 - Kementerian Komunikasi dan Digital





I. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/597/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) rekomendasi untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara. Uraian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan reviu atas seluruh penetapan kinerja, terutama target kinerja tahunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tahunan dan memastikan target kinerja dalam perencanaan tahunan didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan mengalami peningkatan.

Tindak lanjut:

Reviu dilakukan pada saat penyusunan Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025-2029.

2. Melakukan reviu untuk memastikan sasaran dan indikator pada IKU merupakan *core business* dari unit kerja.

Tindak lanjut:

Reviu dilakukan pada saat penyusunan Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025-2029.

3. Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja setiap unit kerja sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Tindak lanjut:

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja organisasi sampai dengan individu perencanaan kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan kinerja individu diimplementasikan melalui sistem informasi yang terintegrasi (PIAWAI).

4. Melakukan reviu indikator kinerja dan formulasi perhitungannya untuk memastikan indikator kinerja telah relevan dalam mengukur sasaran yang ditetapkan dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat menggambarkan dengan baik pencapaian kinerja.

Tindak lanjut:

Reviu dilakukan pada saat penyusunan Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025-2029.

5. Mendorong komitmen pimpinan seluruh unit/satuan kerja agar secara konsisten memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan target kinerja, strategi, dan penetapan anggaran.

Tindak lanjut:

Upaya meningkatkan kualitas pengukuran kinerja mulai dari pimpinan unit/satuan kerja sampai dengan individu dilakukan melalui hasil *monitoring capaian objective key results* secara berkala (triwulanan) melalui *dashboard* PIAWAI.



6. Mengoptimalkan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, agar menggambarkan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tindak lanjut:

Laporan kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam rangka penetapan target kinerja tahun berikutnya dengan tetap mengedepankan peningkatan kinerja Kementerian Sekretariat Negara secara berkelanjutan.

7. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja, baik di level pusat maupun unit kerja, dengan menyajikan analisis tren capaian kinerja dan upaya perbaikan kinerja ke depan, serta melakukan analisis efisiensi sumber daya dengan membandingkan antara kinerja atau output dengan realisasi anggaran disertai dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Tindak lanjut:

Analisis tren capaian kinerja dan analisis efisiensi sumber daya telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja.

8. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal dengan mereviu pedoman evaluasi AKIP internal serta meningkatkan kompetensi evaluator AKIP internal.

Tindak lanjut:

- 1) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara telah memiliki pedoman evaluasi AKIP dan telah dilakukan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dimuat dalam lampiran pedoman evaluasi AKIP.
 - 2) Untuk meningkatkan kompetensi evaluator AKIP internal, Kementerian Sekretariat Negara telah mengirim auditor untuk mengikuti pelatihan evaluasi AKIP yang diselenggarakan oleh BPKP dan melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dalam bentuk *sharing session* dengan narasumber peserta yang telah mengikuti pelatihan.
9. Melaksanakan evaluasi AKIP internal di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Tindak lanjut:

Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan evaluasi AKIP pada unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

10. Meningkatkan kualitas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada unit kerja agar terjadi peningkatan implementasi SAKIP secara signifikan.

Tindak lanjut:

Dalam pelaksanaan evaluasi AKIP unit kerja telah disampaikan catatan dan rekomendasi yang menyentuh substansi sehingga terdapat upaya perbaikan dan peningkatan dalam implementasi SAKIP.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan 12 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja. Berdasarkan pengukuran terhadap 29 indikator kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran bahwa terdapat:

1. sejumlah 23 indikator kinerja atau sebesar 79,31% dari 29 indikator kinerja memiliki capaian melebihi target dengan realisasi diatas 100%; dan
2. sejumlah 6 indikator kinerja atau sebesar 20,69% dari 29 indikator kinerja memiliki capaian sesuai target dengan realisasi sebesar 100%.

Dalam hal pengelolaan anggaran tahun 2025, dari total alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara TA 2025 sebesar Rp6.676.151.787.000,00 telah terealisasi sebesar Rp6.139.057.513.271,00 atau 91,96%. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara capaian indikator sasaran strategis yang lebih tinggi dari realisasi anggaran maka terdapat efisiensi pada Kementerian Sekretariat Negara.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026, antara lain:

1. melanjutkan transformasi digital meliputi perubahan pola pikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal organisasi agar tugas dan fungsi organisasi dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
2. penguatan kelembagaan dan melakukan penyempurnaan bisnis proses secara berkelanjutan;
3. mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan/atau terkoneksi secara internal dan eksternal guna mewujudkan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat yang didasarkan pada data (data driven policy making); dan
4. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.